

PENGARUH NILAI AKUNTABILITAS DAN KONSEP *VALUE FOR MONEY* TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DI BIDANG SEKTOR PUBLIK PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA (BAPPEDASU)

SKRIPSI

**Oleh:
GATA MAYO
188330167**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 14/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)14/8/24

PENGARUH NILAI AKUNTABILITAS DAN KONSEP *VALUE FOR MONEY* TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DI BIDANG SEKTOR PUBLIK PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA (BAPPEDASU)

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Medan Area

Oleh:

**GATA MAYO
188330167**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 14/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)14/8/24

HALAMAN PENGESAHAN

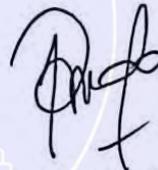
Judul Skripsi : Pengaruh Nilai Akuntabilitas Dan Konsep *Value for money* Terhadap Pengelolaan Keuangan Di Bidang Sektor Publik Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara (BAPPEDASU)

Nama : Gata Mayo
NPM : 188330167
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Disetujui Oleh



(Warsani Purnama Sari, SE, Ak, MM)
Dosen Pembimbing



(Devi Ayu Putri Sirait, SE, M.Si, Ak, CA)
Dosen Pembimbing

Mengetahui



(Ahmad Rafiqi, BBA (Mons), MMgt., Ph.D)
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



(Rana Fathina Ananda, SE, M.Si)
Ka. Prodi Akuntansi

Tanggal Lulus: 3 April 2024

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa Skripsi saya yang berjudul “**Pengaruh Nilai Akuntabilitas Dan Konsep *Value for money* Terhadap Pengelolaan Keuangan Di Bidang Sektor Publik Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara (BAPPEDASU)**” yang saya susun sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain ditulis kan sumber nya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lain nya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 31 Agustus 2023
Yang Membuat Pernyataan



Gata Mayo
NPM. 188330167

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
UGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Gata Mayo
NPM : 188330167
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Jenis Karya : Tugas Akhir/Skripsi
Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan

kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Non eksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul **Pengaruh Nilai Akuntabilitas Dan Konsep Value for money Terhadap Pengelolaan Keuangan Di Bidang Sektor Publik Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara (BAPPEDASU)**. Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat dan mempublikasi kan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan
Pada Tanggal : 31 April 2024
Yang Menyatakan,

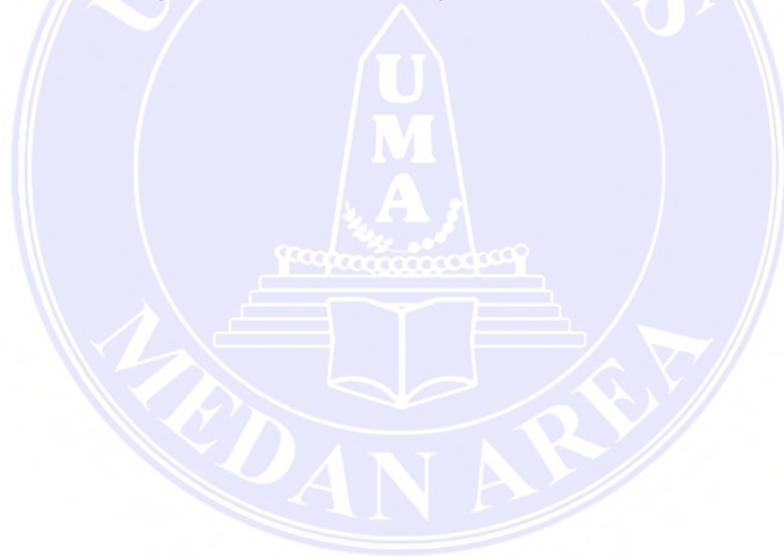


Gata Mayo
NPM. 188330167

ABSTRACK

This study aims to determine the effect of the value of accountability and the concept of Value for money on financial management in the public sector at the Regional Development Planning Board of North Sumatra Province. This type of research is associative. The population in this study was 105 ASN. The sample in this study were 41 State Civil Servants (ASN) in planning, control and planning evaluation, economics, finance, program division, accountability and public information and information monitoring at the Regional Development Planning Board of North Sumatra Province. The type of data used in this research is primary data. The data collection method used is questionnaire data. The data analysis method used in this study consisted of descriptive statistical tests, validity tests, reliability tests, normality tests, multicollinearity tests, heteroscedasticity tests, multiple linear regression analysis tests, t-tests, f-tests, and tests of the coefficient of determination using the application IBM SPSS version 21. The results showed that the variable values of accountability and the concept of Value for money partially had a positive and significant effect on financial management in the public sector at the Regional Development Planning Board of North Sumatra Province

Keywords: *Value Accountability, Value for money Concept, Financial Management In the Field of Public Sector*



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh nilai akuntabilitas dan konsep *Value for money* terhadap pengelolaan keuangan dibidang sektor publik pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara. Jenis penelitian ini adalah asosiatif. Populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 105 ASN. Sampel dalam penelitian ini adalah 41 Aparatur Sipil Negara (ASN) pada bidang perencanaan, bidang pengendalian dan evaluasi perencanaan, bidang perekonomian, bidang keuangan, bidang bagian program, akuntabilitas dan informasi publik dan bidang monitoring informasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah data kuesioner. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari uji statistik deskriptif, uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji analisis regresi linier berganda, uji-t, uji-f, dan uji koefisien determinasi dengan menggunakan aplikasi IBM SPSS versi 21. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel nilai akuntabilitas dan konsep *Value for money* secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan dibidang sektor publik pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Kata kunci: Nilai Akuntabilitas, Konsep *Value for money*, Pengelolaan Keuangan Dibidang Sektor Publik

RIWAYAT HIDUP



Nama	Gata Mayo Julio Simbolon
NPM	188330167
Tempat, Tanggal Lahir	Medan, 20 Juli 2000
Nama Orang Tua :	
Ayah	Yohannes Simbolon
Ibu	Masti Pasaribu
Riwayat Pendidikan :	
SMP	SMP Negeri 7 Medan
SMA/SMK	SMA Swasta Raksana Medan
Riwayat Studi di UMA	Tahun 2018
Pengalaman Pekerjaan	
No. HP/WA	0831-9383-5932
Email	gatamayo588@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas dengan segala Berkat dan Karunianya telah melindungi saya dalam penelitian proposal skripsi ini. Proposal skripsi ini telah menjadi persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studi di Universitas Medan Area, Sehubungan dengan itu, disusunnya proposal skripsi ini dengan judul **“Pengaruh Nilai Akuntabilitas Dan Konsep *Value for money* Terhadap Pengelolaan Keuangan Di Bidang Sektor Publik Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara (BAPPEDASU).”**

Dalam penyusunan ini banyak hambatan serta rintangan yang dihadapi namun pada akhirnya dapat melaluinya berkat adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara moral maupun spiritual. Peneliti juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh sebab itu peneliti mengharapkan kritik dan saran guna kesempurnaan skripsi ini.

Skripsi ini tidak akan berhasil tanpa peran serta dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, ucapan terima kasih disampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc selaku rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Ahmad Rafiki BBA(Horns), MMgt, Ph.D, CIMA selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area.
3. Ibu Rana Fathina Ananda, SE, M.Si Selaku Ketua Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Medan Area.

4. Ibu Warsani Purnama Sari, SE, Ak, CA, MM Selaku Dosen Pembimbing
5. Ibu Devi Ayu Putri Sirait, SE, M.Si, Ak, CA Selaku Dosen Pembanding.
6. Ibu Shabrina Tri Asti Nasution, SE, M.Si Selaku Dosen Sekretaris.
7. Bapak Dr. M. Akbar Siregar, M.Si Selaku Dosen Ketua Sidang.
8. Orang Tua peneliti Bapak Yohannes Simbolon dan Ibu Masti Pasaribu yang senantiasanya memberikan doa, kepercayaan, dan dukungan buat peneliti.

Akhir kata dengan kerendahan hati peneliti ucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada semua pihak yang terlibat dengan harapan semoga peneliti ini bermanfaat bagi semua pihak.

Medan, April 2024
Peneliti,



Gata Mayo
NPM. 188330167

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRACT	i
ABSTRAK	ii
RIWAYAT HIDUP	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Pertanyaan Penelitian.....	11
1.4 Tujuan Penelitian.....	11
1.5 Manfaat Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
2. Landasan Teori.....	13
2.1.1 Pengelolaan Keuangan di Bidang Sektor Publik.....	13
2.2 Akuntabilitas	16
2.2.1 Pengertian Akuntabilitas	16
2.2.2 Indikator Akuntabilitas	17
2.3 Konsep <i>Value for money</i>	18
2.3.1 Pengertian <i>Value for money</i>	18
2.3.2 Indikator <i>Value for money</i>	19
2.3.3 Langkah-Langkah <i>Value for money</i>	21
2.4 Penelitian Terdahulu.....	23
2.5 Kerangka Konseptual	25
2.6 Hipotesis Penelitian	26
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	29
3.1 Desain Penelitian	29
3.2 Objek dan Waktu Penelitian	29
3.2.1 Objek Penelitian	29
3.2.2 Waktu Penelitian	30
3.3 Defenisi Operasional Variabel dan Instrumen Penelitian	30
3.3.1 Defenisi Operasional Variabel.....	30
3.3.2 Instrumen Penelitian	32
3.4 Populasi dan Sampel.....	33
3.4.1 Populasi.....	33
3.4.2 Sampel Penelitian.....	33
3.5 Metode Pengumpulan Data	34

3.6 Metode Analisis Data.....	34
3.6.1 Uji Analisis Statistik Deskriptif.....	35
3.6.2 Uji Kualitas Data	35
3.6.3 Uji Asumsi Klasik	36
3.6.4 Uji Regresi Linier Berganda.....	38
3.6.5 Uji Hipotesis	38
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	41
4.1 Gambaran Umum Perusahaan	41
4.1.1 Deskripsi Objek Penelitian	41
4.1.2 Visi & Misi BAPPEDA Provinsi Sumatera Utara.....	43
4.2 Hasil Uji Statistik Deskriptif	45
4.2.1 Hasil Uji Statistik	50
4.2.2 Hasil Uji Validitas.....	51
4.2.3 Hasil Uji Realibilitas	53
4.3 Hasil Uji Asumsi Klasik	53
4.3.1 Hasil Uji Normalitas	53
4.3.2 Hasil Uji Multikolinearitas	55
4.3.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	56
4.4 Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda.....	57
4.5 Hasil Uji Hipotesis	58
4.5.1 Hasil Pengujian secara Parsial (Uji t).....	58
4.5.2 Hasil Uji F (Simultan)	60
4.5.3 Hasil Uji Koefisien Determinasi.....	60
4.6 Pembahasan	62
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	66
5.1 Kesimpulan	66
5.2 Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	68
DAFTAR LAMPIRAN.....	71

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel2.1 Penelitian Terdahulu.....	23
Tabel3.1 Waktu Penelitian.....	30
Tabel3.2 Defenisi Operasional Variabel	31
Tabel3.3 Sampel Perusahaan.....	33
Tabel 3.4 Kriteria Pengambilan Sampel.....	34
Tabel4.1 Data Penyebaran Kuesioner.....	45
Tabel4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	45
Tabel4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia	46
Tabel4.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Jabatan.....	46
Tabel4.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Golongan	47
Tabel4.6 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan	47
Tabel4.7 Tanggapan Responden Variabel Y	48
Tabel4.8 Tanggapan Responden Variabel X1	49
Tabel4.9 Tanggapan Responden Variabel X2	49
Tabel4.10 Hasil Uji Statistik Deskriptif	50
Tabel4.11 Hasil Uji Validitas	52
Tabel4.12 Hasil Uji Realibilitas.....	53
Tabel4.13 Hasil Uji Normalitas <i>Kolmogorov Smirnov Test</i>	54
Tabel4.14 Hasil Uji Multikolinearitas	56
Tabel4.15 Hasil Uji Analisis Linear Regresi Berganda.....	57
Tabel4.16 Hasil Uji t (Parsial).....	59
Tabel4.17 Hasil Uji F (Simultan).....	60
Tabel4.18 Hasil Uji Koefisien Determinasi.....	61

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual.....	29
Gambar 4.1 Hasil Uji Histogram.....	58
Gambar 4.2 Hasil Uji Normal P-Plot.....	59
Gambar 4.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas	60



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Hasil Tabulasi Data	61
Lampiran 2 Hasil Output SPSS	66



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan keuangan sektor publik menurut Bratakusumah dan Solihin (2004) adalah semua hak dan kewajiban pusat dan daerah terkait penyelenggaraan pemerintahan dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dapat dinilai dengan uang yang dikelola secara efektif dan efisien untuk meningkatkan kinerja suatu pemerintah daerah. Kefektifan dan keefisienan pengelolaan keuangan sektor publik sangat berkaitan dengan kinerja keuangan pemerintah daerah, dapat disimpulkan kinerja keuangan akan semakin baik apabila pengelolaan keuangan diolah secara efektif dan efisien.

Pengelolaan keuangan daerah merupakan semua program kegiatan yang dilaksanakan oleh para pejabat yang berwenang dalam pengelolaan keuangan yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pertanggungjawaban (Hasugian et al.,2021). Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006, yang dimaksud dengan keuangan daerah adalah segala hak dan kewajiban termasuk dalam bentuk kekayaan yang dimiliki oleh suatu daerah yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan pemerintahannya sendiri dan dapat dinilai secara moneter. Rangkaian proses atau siklus pengelolaan keuangan daerah yang dimulaidari proses penganggaran terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan akuntansi untuk pelaksanaan APBD. Sedangkan, pihak pengelola keuangan daerah terdiri dari Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang merupakan kepala satuan pengelolaan keuangan daerah yang bertanggung jawab atas

pelaksanaan anggaran daerah dan sekaligus bertindak sebagai bendahara umum daerah.

Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah wajib dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, transparan, akuntabel, tertib, efektif, efisien, dan ekonomis serta didasarkan atas prinsip keadilan, kepatuhan dan kemanfaatan bagi masyarakat (Sains F. S. 2018). Pemerintah daerah wajib menerbitkan laporan keuangan yang berkualitas, dimana kualitas laporan keuangan tersebut mencerminkan pengelolaan keuangan sektor publik yang baik dan telah memenuhi tertib asas dan administrasinya. Laporan keuangan pemerintah daerah dinyatakan sudah berkualitas apabila dengan diterimanya opini Wajar Tanpa Pengecualian yang diberikan oleh BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah sebagai indikatornya. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang berkualitas harus relevan, jika dalam penyajian laporan keuangan tidak relevan dan tidak dapat diandalkan maka informasi tidak dapat digunakan atau dipercaya oleh pihak pengguna informasi tersebut. Oleh karena itu, Laporan keuangan yang berkualitas sangat penting.

Dalam prosedur pelaporan keuangan pemerintah daerah dilakukan berdasarkan pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan. Setelah sesuai dengan standar yang berlaku, kemudian laporan keuangan daerah harus diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) (Adhi dan Suhardjo, 2013). Mardiasmo (2004) menegaskan bahwa sistem pertanggungjawaban keuangan suatu institusi dapat berjalan dengan baik apabila terdapat mekanisme pengelolaan keuangan yang baik pula. Isu mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah saat

ini menjadi sorotan publik karena belum memperlihatkan hasil yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Sebagai perwujudan dari konsep otonomi daerah, masyarakat menuntut agar pemerintah daerah mempunyai kinerja keuangan yang baik dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya (Firmansyah & Rahmawati, 2020).

Apabila pemerintah mampu mengelola pemerintahannya hingga masyarakat dapat merasakan kesejahteraan secara keseluruhan, maka pemerintahan itu dapat dikatakan mempunyai kinerja keuangan yang baik. Pemerintah harus memiliki kinerja keuangan yang baik mengingat semakin meningkatnya tuntutan mengenai hal ini termasuk Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bertepatan dengan dilaksanakannya otonomi daerah melalui Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah daerah merupakan pemerintah yang sering menjadi sorotan publik salah satunya Pemerintah Provinsi Sumatera Utara seiring dengan terjadinya suksesi kepemimpinan atau pergantian Kepala Daerah pada tahun 2021 lalu.

Oleh karena itu, agar manajemen pemerintahan yang akuntabel segera terwujud, Kepala Daerah terpilih yang baru diharapkan harus mampu berusaha mempertahankan bahkan meningkatkan kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2021, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama dengan 486 pemerintah daerah yang lain mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) atas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan berupa Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2020. Dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sudah pada level yang baik sehingga Kepala Daerah terpilih wajib mempertahankan bahkan meningkatkan kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara ke level yang lebih baik lagi.

Berdasarkan penelitian diatas yang masih tidak konsisten terhadap nilai perusahaan, sehingga peneliti bermaksud untuk meneliti kembali agar dibuktikan hasil yang lebih konsisten. Perusahaan industri barang konsumsi merupakan salah satu sektor industri yang cukup menarik. Hal ini dikarenakan produk barang konsumsi selalu dibutuhkan dalam kehidupan manusia. Sehingga peneliti mengambil judul skripsi: Pengaruh Nilai Akuntabilitas Dan Konsep *Value for money* Terhadap Pengelolaan Keuangan Di Bidang Sektor Publik Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Bappedasu).

1.2 Rumusan Masalah

Fenomena yang terjadi seiring dengan perkembangan pengelolaan keuangan sektor publik pada masyarakat Indonesia saat ini yaitu guna meningkatkan terwujudnya *good governance* yang sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan pemerintahan maka muncul tuntutan pemerintah agar organisasi sektor publik dalam pelaksanaan kegiatannya harus menjunjung tinggi akuntabilitas dalam laporan keuangan pemerintah daerahnya. Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Pada dasarnya semua peraturan tersebut menghendaki penerapan akuntabilitas dalam penyusunan laporan keuangan.

Dengan di tetapkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia (PERPRES) No.29 Tahun 2014 menjelaskan tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, yang mana pemerintahan memberikan kewajiban berbagai instansi baik pusat dan juga daerah serta eselon II untuk mengimplementasikan SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) dan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah). Menurut Mardiasmo (2016 : 20) “Akuntabilitas merupakan kewajiban pihak yang ditunjuk sebagai pemegang amanah (agent) untuk dapat menyajikan, memberi pertanggung jawaban, melaporkan, serta mengungkapkan semua kegiatan sebagai bentuk pertanggungjawabannya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang mempunyai hak untuk mendapatkan pertanggungjawaban tersebut”. Instansi sektor publik memperoleh tuntutan untuk lebih efisien, mempertimbangkan biaya ekonomi dan sosial, serta mempertimbangkan pengaruh negatif mengenai kegiatan yang dilaksanakan, karena sektor publik sering sekali dipandang negatif bagi sebagian pihak, contohnya dianggap sarang dari inefisiensi, asal usul kebocoran dana sekaligus sumber pemborosan serta sektor selalu merugi maka timbul lah permintaan agar organisasi sektor publik lebih memperhatikan kualitas dan profesionalisme dan harus fokus pada konsep *Value for money* (Mardiasmo, 2009).

Dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan anggaran, lembaga sektor publik sering sekali mendapat perhatian dari masyarakat termasuk Bappeda Provinsi Sumatera Utara. Bappeda bertugas untuk mengatur semua permasalahan tentang perencanaan dan pembangunan daerah, maka dari itu Bappeda dituntut untuk akuntabel dalam menjalankan pengelolaan anggarannya untuk publik. Selain itu dalam melaksanakan kegiatannya, pemerintah daerah berkewajiban untuk melakukan perencanaan biaya yang akan digunakan agar sehemat mungkin dengan hasil yang memuaskan untuk menghindari pemborosan anggaran.

Pendapat publik mengenai besarnya jumlah anggaran yang dianggarkan yang dianggap sebagai pemborosan tersebutlah yang dijadikan sebagai dasar pentingnya memperhatikan konsep *Value for money* untuk dikaji lebih dalam pada saat merencanakan anggaran yaitu dengan memperhatikan konsep ekonomi, efisiensi dan juga efektivitas (Septariani, 2018). Untuk mengimplementasikan dan mencapai sasaran atau target dari prioritas pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara, maka Bappeda Provinsi Sumatera Utara diwajibkan melaksanakan beberapa program dan kegiatan yang dianggarkan mengacu pada program dan kegiatan yang terdapat pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Adapun beberapa program yang dimaksud dan ringkasan laporan realisasi anggaran Bappeda Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut ini:

Tabel I.1
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Bappeda Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2017-2020

Program	2017			2018			2019			2020		
	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah	4.300.400.000	4.050.889.715	99,19%	3.646.218.550	3.288.563.160	90,19%	2.987.513.862	2.766.972.927	92,61%	7.442.664.987	1.144.058.119	15,37%
2. Program Peningkatan Kapasitas Perencanaan Daerah	6.542.262.000	5.883.511.884	89,93%	5.019.204.550	4.328.590.101	86,24%	5.939.006.775	5.267.606.447	88,69%	7.777.984.150	545.731.050	7,01%
3. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis & Cepat Tumbuh	200.000.000	188.675.600	94,33%	167.398.000	151.813.050	90,69%	183.254.000	125.907.841	68,70%	-	-	-
4. Program Pengembangan Data & Informasi	2.275.511.900	2.033.845.400	89,37%	2.274.943.151	2.147.567.850	94,40%	1.721.633.673,92	1.630.472.552	94,70%	2.271.344.500	332.512.632	14,63%
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja Keuangan	73.895.000	66.976.400	90,63%	10.508.650	8.418.000	80,11%	-	-	-	14.200.000	Tidak dilaksanakan karena refocusing anggaran	-
6. Program Perencanaan & Penataan Ruang	606.300.000	589.171.900	97,17%	212.279.500	198.020.250	93,28%	214.485.000	198.877.900	92,72%	-	-	-
7. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	-	-	-	-	-	6.592.576.276	6.317.785.191	95,83%	7.140.725.550	2.451.686.994	34,33%
8. Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur	-	-	-	-	-	-	759.591.580	185.058.731	24,36%	581.105.750	249.114.300	42,87%
9. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	-	-	-	-	-	-	119.000.000	92.740.500	77,93%	179.000.000	Tidak dilaksanakan karena refocusing anggaran	-
10. Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	248.456.000	Tidak dilaksanakan karena refocusing anggaran	-
JUMLAH TOTAL	13.998.368.900	12.813.070.889	91,53%	11.330.552.401	10.122.972.411	89,34%	18.517.091.167	16.585.422.089	89,56%	25.655.480.937	4.723.103.095	18,40%

Sumber: LAKIP Bappeda Provinsi Sumatera Utara

Berdasarkan tabel ringkasan laporan realisasi anggaran yang tertera diatas dapat disimpulkan bahwa dalam 4 tahun terakhir yaitu dari tahun 2017-2020 pelaksanaan realisasi anggaran Bappeda Provinsi Sumatera Utara mengalami ketidakstabilan naik turun. Jumlah realisasi paling rendah terjadi pada tahun 2020 dengan jumlah anggaran Rp. 25.655.480.937 dan realisasi nya sejumlah Rp. 4.723.103.095. Hal ini disebabkan karena munculnya pandemi Covid-19 yang menyerang seluruh Negara, yang kemudian pemerintah pusat mengeluarkan arahan kebijakan untuk melakukan perubahan program/kegiatan serta pendanaan seluruh daerah dengan mewajibkan seluruh Pemerintah Daerah melaksanakan refocussing anggaran dalam rangka penanganan serta penyebaran Covid-19. Adanya Pandemi Covid-19 ini lah yang membuat pelaksanaan realisasi anggaran Bappeda Provinsi Sumatera Utara kurang berjalan secara optimal.

Namun demikian, walaupun adanya Pandemi Covid-19 tidak mengurangi harapan masyarakat agar instansi pemerintah tetap berupaya semaksimal mungkin dalam pelaksanaan realisasi anggarannya agar sesuai dan tercapai apa yang menjadi tujuan, sasaran serta target bagi instansi maupun masyarakat. Perubahan pertumbuhan dari pelaksanaan realisasi anggaran adalah salah satu faktor yang diperlukan dalam penilaian kinerja pengelolaan keuangan yang terdapat pada organisasi dan menjadi hal yang menarik untuk diteliti. Informasi ini berguna bagi pemakai laporan untuk proses pengambilan keputusan terkait alokasi dana sumber daya ekonomis, ketaatan pemerintah daerah mengenai anggaran dan akuntabilitas. Namun demikian, Bappeda Provinsi Sumatera Utara terus berupaya semaksimal mungkin untuk fokus menyesuaikan terkait perubahan serta pengembangan proses penyusunan dan realisasi anggarannya.

Pemenuhan tuntutan masyarakat kepada pemerintah masih menemui banyak permasalahan, terutama di pemerintah daerah. Hal ini dibuktikan dengan fakta bahwa instansi yang paling sering diadukan oleh masyarakat adalah Pemerintah Daerah (Ombudsman RI, 2017).

Kurang transparannya proses penyelenggaraan pemerintah di daerah yang mengakibatkan pemerintah daerah menjadi instansi yang paling sering mendapat kritik dari masyarakat. Sehingga hal ini dapat menciptakan kesempatan adanya kasus korupsi yang dilakukan oleh para petinggi. Masalah tersebut yang mendorong pemerintah daerah untuk melakukan perubahan dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang profesional. Salah satunya dengan e- Budgeting.

Melalui peraturan Gubernur Nomor 145 tahun 2013 mengenai penyusunan RAPBD/APBDP pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulaimenggagas penerapan *e-Budgeting* pada tahun 2013. Keberhasilan penerapan e- Budgeting pertama kali diterapkan oleh kota Surabaya yang kemudian Pemprov DKI Jakarta mempelajari sistem ini karena sistem ini diakui mampu mengurangi adanya anggaran-anggaran 'siluman' dan inefisiensi anggaran daerah, karena adanya pengawasan mulai dari perencanaan sampai pertanggung jawaban. Selain itu, penyusunan anggaran akan lebih efektif dan efisien apabila menggunakan sistem e-Budgeting karena dilakukan secara elektronik. Sistem e-Budgeting tersebut kepada masyarakat dan penerapannya yang tidak terintegrasi dengan capaian kinerja yang diinginkan.

Terlebih lagi ditengah pandemi Covid-19 saat sekarang ini, yang mana agar masyarakat tidak resah maka masyarakat sangat membutuhkan informasi dan data yang tidak simpang siur dan informasi yang benar-benar telah terintegritas antara data di badan publik pusat dengan data di badan publik daerah. Pemerintah diharapkan mampu memajukan akuntabilitas pada pengelolaan keuangan daerahnya. Untuk tercapainya hal ini yaitu pemerintah berkewajiban menyediakan segala informasi tentang keuangan yang tepat, jujur serta terbuka kepada masyarakat, karena aktivitas pemerintah adalah menjalankan amanah publik. Selain itu juga berkewajiban untuk menerapkan konsep *Value for money* dalam memperhatikan ekonomi, efisiensi dan efektivitas sebagai upaya menciptakan good governance. Penelitian sebelumnya seperti Redi Antonius Nababan, Marlon Sihombing, & Husni Thamrin (2018) dengan judul Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Berkonsep *Value for money* pada Pemerintah di Kabupaten Dairi, Hasil penelitiannya Akuntabilitas berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan berkonsep *Value for Money*.

Sejalan dengan penelitian Ricky Ari Syahputra (2018) yang berjudul Pengaruh Akuntabilitas Keuangan Daerah, *Value for money*, Kejujuran, dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kajian pada Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Pusat) dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa *Value for money*, Kejujuran, dan Pengawasan berhubungan secara positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang dan akuntabilitas serta konsep *Value*

for money yang ada pada BAPPEDA Provinsi Sumatera Utara. Dari uraian diatas penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Akuntabilitas dan Konsep *Value for money* Terhadap Pengelolaan Keuangan Dibidang Sektor Publik Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara (BAPPEDASU).

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah nilai akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan dibidang sektor publik pada BAPPEDA Provinsi Sumatera Utara?
2. Apakah konsep *value for money* berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan dibidang sektor publik pada BAPPEDA Provinsi Sumatera Utara?
3. Apakah nilai akuntabilitas dan konsep *value for money* berpengaruh secara simultan terhadap pengelolaan keuangan dibidang sektor publik pada BAPPEDA Provinsi Sumatera Utara?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka dapat diketahui bahwa tujuan penelitian sebagai berikut

1. Untuk mengetahui pengaruh nilai akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan dibidang sektor publik pada BAPPEDA Provinsi Sumatera Utara.
2. Untuk mengetahui pengaruh konsep *value for money* terhadap pengelolaan keuangan dibidang sektor publik pada BAPPEDA Provinsi Sumatera Utara.

3. Untuk mengetahui pengaruh nilai akuntabilitas dan konsep *value for money* terhadap pengelolaan keuangan dibidang sector publik pada BAPPEDA Provinsi Sumatera Utara.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis

Untuk menambah wawasan mengenai pengaruh akuntabilitas dan konsep *value formoney* terhadap pengelolaan keuangan dibidang sektor publik pada BAPPEDA Provinsi Sumatera Utara.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan informasi mengenai pentingnya akuntabilitas dan konsep *value for money* terhadap pengelolaan keuangan dibidang sektor publik sehingga dapat menjadi masukan atau pedoman dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan pada BAPPEDA Provinsi Sumatera Utara.

3. Secara Kebijakan

Peneliti mengharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu referensi kedepannya untuk kegiatan penelitian yang sejenis yaitu mengenai peranan akuntabilitas dan konsep *Value for money* terhadap pengelolaan keuangan dibidang sektor publik pada BAPPEDA Provinsi Sumatera Utara.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

22.1.1 Pengelolaan Keuangan Di Bidang Sektor Publik

Pengelolaan keuangan sektor publik menurut Bratakusumah dan Solihin (2004) adalah semua hak dan kewajiban pusat dan daerah terkait penyelenggaraan pemerintahan dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dapat dinilai dengan uang yang dikelola secara efektif dan efisien untuk meningkatkan kinerja suatu pemerintah daerah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan semua program kegiatan yang dilaksanakan oleh para pejabat yang berwenang dalam pengelolaan keuangan yang terdiri dari proses perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pertanggungjawaban. Pengelolaan keuangan sektor publik tidak terlepas dari ilmu akuntansi sektor publik. Menurut Abdul Halim (2012 : 3) “Akuntansi sektor publik merupakan suatu proses pengidentifikasian, pencatatan dan pelaporan mengenai transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu organisasi atau entitas publik seperti pemerintah, LSM dan lain-lain yang dapat dijadikan sebagai informasi untuk pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak yang membutuhkan”.

A. Indikator Pengelolaan Keuangan Di Bidang Sektor Publik

Indikator dalam pengelolaan keuangan sektor publik Menurut Mardiasmo (2016 : 18) yaitu:

1. Penyediaan informasi Pengelolaan keuangan sektor publik berkaitan erat dengan peran akuntansi dalam penyediaan informasi keuangan untuk

pihak eksternal organisasi. Keterbukaan pemerintah daerah dalam menetapkan kebijakan keuangan daerah agar dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat.

2. Pengendalian manajemen Tujuan pengendalian manajemen yaitu untuk memastikan kegiatan pemerintahan berjalan sesuai kebijakan yang berlaku, menjaga aset atau keuangan dalam sebuah organisasi, serta menghasilkan laporan keuangan yang akurat, tepat, ekonomis, efektif dan efisien.
3. Akuntabilitas Laporan keuangan yang telah diaudit oleh inspektorat atau Badan Pemeriksa Keuangan merupakan bentuk dari akuntabilitas publik.

Selain itu, Anggaran daerah harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada publik melalui DPRD. Menurut Mustari (2020) dalam penelitiannya indikator akuntansi sektor publik sebagai berikut:

1. Ketepatan waktu
2. Koordinasi
3. Rentang manajemen
4. Target dan sasaran
5. Produktivitas

Pengelolaan keuangan sektor publik berkaitan erat dengan peran akuntansi dalam penyediaan informasi keuangan untuk pihak eksternal organisasi. Oleh karena itu, pelaporan keuangan sektor publik merupakan alat penting terciptanya akuntabilitas publik. Menurut Saskia et al., (2020) indikator pengelolaan akuntansi sektor publik berisi tentang:

1. Standart akuntansi keuangan sektor publik.
2. Sistem akuntansi keuangan sektor publik.

B. Prinsip Pengelolaan Keuangan Di Bidang Sektor Publik

Dalam kehidupan bisnis, permasalahan dalam pengelolaan keuangan sektor publik sangat perlu dipertimbangkan. Sehingga Mardiasmo (2016) membagi prinsip-prinsip pengelolaan keuangan sektor publik sebagai berikut:

1. Akuntabilitas yang memiliki makna keadaan seseorang yang berdasarkan hasil pekerjaannya dapat diukur dan dinilai oleh orang lain dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.
2. Efektivitas merupakan tercapainya tujuan yang sudah ditentukan.
Pengelolaan keuangan disebut efektif apabila aktivitas yang dijalankan dapat mengelola keuangan tujuan organisasi dengan hasil yang diinginkan.
3. Efisiensi mengacu pada kuantitas berdasarkan hasil kegiatan yang dilakukan. Efisiensi adalah perbandingan input serta output yang antarlain dana, daya, waktu.

C. Fungsi dan Tujuan Laporan Keuangan Sektor Publik

Akuntansi berfungsi sebagai penyedia sekaligus pemberi informasi keuangan kepada pihak eksternal yang berhubungan dengan akuntansi keuangan sektor publik. Pentingnya informasi akuntansi berkembang bersamaan dengan meluasnya permintaan akuntabilitas oleh organisasi publik untuk diimplementasikan. Pelaporan keuangan sektor publik merupakan alat penting agar terciptanya akuntabilitas publik. Selain itu, pelaporan keuangan

sektor publik yang tepat dan andal memerlukan standar dan sistem akuntansi sektor publik yang baik. Secara garis besar, fungsi-fungsi dari laporan keuangan sektor publik menurut Mardiasmo (2016 : 184) antara lain:

1. Sebagai bentuk ketaatan dan pengelolaan.
2. Sebagai bentuk akuntabilitas tanggungjawab dan pelaporan.
3. Sebagai bentuk perencanaan dan informasi otorisasi.
4. Sebagai bentuk keberlangsungan organisasi.
5. Sebagai bentuk interaksi dengan masyarakat.
6. Sebagai sumber fakta dan gambaran.

2.2 Akuntabilitas

2.2.1 Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas berasal dari bahasa Inggris "accountability" yang artinya pertanggungjawaban atau adanya suatu kondisi untuk diminta pertanggungjawaban. Menurut Mardiasmo (2016) menerangkan bahwa "Akuntabilitas merupakan kewajiban pihak yang ditunjuk sebagai pemegang amanah (agent) untuk dapat menyajikan, memberi pertanggungjawaban, melaporkan, serta mengungkapkan semua aktivitas sebagai bentuk pertanggungjawabannya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang mempunyai hak untuk mendapatkan pertanggungjawaban tersebut".

Standar Akuntansi Pemerintahan (2016) mendefinisikan "Akuntabilitas adalah kepercayaan yang diberikan kepada entitas pelaporan untuk mencapai tujuan dengan mempertanggungjawabkan kegiatan penyelenggaraan sumber daya dan kebijakan yang telah ditetapkan". Akuntabilitas publik diketahui terbagi atas 2

(dua), yaitu akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*) yaitu pertanggungjawaban mengenai pengelolaan dana yang ditujukan bagi kekuasaan yang lebih tinggi seperti unit kerja dinas kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, selanjutnya pemerintah pusat kepada DPR serta akuntabilitas horizontal (*horizontal accountability*) yaitu pertanggungjawaban kepada publik atau masyarakat luas (Kusumastuti : 2014).

2.2.2 Indikator Akuntabilitas

Menurut Mardiasmo (2016 : 21), akuntabilitas publik mempunyai beberapa indikator yaitu:

1. Kejujuran dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (abuse of power).
2. Prosedur pelaksanaan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi.
3. Pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan pertimbangan mengenai alternatif program yang dapat memberikan hasil yang optimal dengan biaya minimal.
4. Kebijakan mengenai pertanggungjawaban pemerintah baik pusat maupun daerah.

Beberapa indikator akuntabilitas yang dikemukakan Shafratunnisa (2016) antara lain:

1. Pencapaian sasaran tujuan pada pengelolaan keuangan sektor publik.

2. Terdapat partisipasi pemerintah pada pengelolaan keuangan sektor publik.
3. Terdapat pengawasan oleh tim pelaksanaan.
4. Terdapat laporan mengenai pertanggungjawaban pengelolaan keuangan di sektor publik.

Sedangkan menurut Krina P (2003) menyebutkan bahwa akuntabilitas dapat diukur berdasarkan kegiatan pengambilan keputusan ditentukan secara tertulis dan tersedia bagi publik yang memerlukannya, dengan setiap keputusan yang ditetapkan sudah sesuai dengan standar etika, nilai-nilai yang berlaku, serta prinsip administrasi yang tepat.

1. Akurasi dan kelengkapan informasi yang berkaitan dengan prosedur dalam mencapai tujuan kegiatan program.
2. Kejelasan dari sasaran kebijakan yang diterapkan.
3. Konsistensi dan kelayakan dari target operasional.
4. Sistem informasi manajemen dan monitoring hasil.

2.3 Konsep *Value for money*

2.3.1 Pengertian *Value for money*

Value for money memiliki makna penghargaan terhadap nilai uang. Menurut Mardiasmo (2016 : 5) “*Value for money* adalah suatu konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang didasarkan pada tiga elemen utama yaitu ekonomis, efisien dan efektivitas”. Konsep *value for money* disebut sebagai pokok utama dari pengukuran atau penilaian kinerja di sektor publik karena itu merupakan konsep inipenting diterapkan dalam organisasi sektor publik. Menurut

Abdul Halim (2012 : 132) “Konsep *Value for money* yaitu suatu konsep yang digunakan untuk menilai dan mengukur nilai ekonomi, efektivitas, dan efisiensi kinerja program dari suatu organisasi”. Konsep *value for money* muncul karena adanya pandangan bahwa sektor publik sering dinilai sebagai sarang inefisiensi, pemborosan, asal mula kebocoran dana sekaligus sebagai organisasi yang sering mengalami kerugian.

Maka dari itulah muncul adanya suatu paksaan kepada organisasi sektor publik untuk lebih mencermati *value for money* dalam melaksanakan kegiatannya. Dalam menilai kinerja pemerintah bukan hanya dipertimbangkan dari sisi output yang dihasilkan dari suatu kegiatan saja, namun perlu juga memperhatikan input, output dan income pada saat yang bertepatan. Input adalah sumber daya berupa masukan yang digunakan dalam pengimplementasian suatu prosedur, program dan aktivitas. Output dapat disebut sebagai keluaran yang digunakan untuk mencapai suatu hasil dari suatu kegiatan atau program. Sedangkan *outcome* merupakan hasil dari suatu program, aktivitas atau dari kebijakan. *Value for money* bisa terwujud jika organisasi dinilai telah mempergunakan biaya input dengan nilai paling rendah untuk pencapaian output yang maksimal sebagai upaya pencapaian tujuan organisasi.

2.3.2 Indikator *Value for money*

Mardiasmo (2016 : 164) berpendapat pemberian informasi yang berkaitan dengan proses pengambilan keputusan merupakan fungsi indikator kinerja pada konsep value for money. Menurut Mardiasmo (2016 : 164) indikator *value for money* terdiri dari dua indikator yaitu:

1. Ekonomis

Ekonomis yang berarti memperhatikan tingkat kualitas pada harga terbaik (spending less) pada saat membeli suatu barang dan jasa.

2. Efisiensi

Efisiensi merupakan hasil dari pelaksanaan program tertentu tercapai dengan penggunaan sumber daya seminimal mungkin (spending well).

3. Efektivitas

Efektivitas berarti bahwa kontribusi output mengarah pada tercapainya sasaran dari tujuan yang ditentukan (spending wisely).

Sedangkan efektivitas kualitas pelayanan mengacu pada konsistensi dan kepuasan publik dinilai dari menurunnya tingkat complaint dari masyarakat terhadap organisasi publik. Atau secara sederhananya, berdasarkan penelitian sebelumnya dari Saskia et al.,(2020) menyebutkan indikator dalam *value for money* berisi tentang:

1. Ekonomis dalam mengelola prosedur administrasi.
2. Efektivitas dalam melaksanakan program kerja.
3. Efisien dalam pengelolaan anggaran.

Harapan publik dengan di terapkan nya *value for money* pada organisasi sektor publik adalah ekonomis saat penggunaan dan alokasi sumber daya dan efisien yang berarti pelaksanaannya lebih diminimalisir dengan hasil yang optimal, dan efisiensi dalam mencapai sasaran dan tujuan. Oleh karena itu, menurut Mustari (2020) didalam penelitian nya menjelaskan indikator konsep *value for money* antara lain:

1. Penggunaan sumber daya yang hemat dan tepat guna.
2. Penggunaan sumber daya financial secara optimal.
3. Proses menghasilkan output yang optimal dengan memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki.

Implementasi konsep *value for money* diorganisasi sektor publik pastinya sangat menguntungkan serta bermanfaat baik bagi organisasi dan juga masyarakat. Manfaat dari implementasi konsep *value for money* dalam organisasi sektor publik yaitu: dapat memajukan produktivitas pelayanan publik, yang artinya pelayanan yang sudah di tetapkan sesuai target, dapat memajukan kualitas pelayanan terhadap publik, meminimalisir anggaran pelayanan publik, alokasi biaya yang lebih mempertimbangkan keperluan publik, dapat memajukan pemahaman mengenai keuangan publik (*public costs awareness*) yang dijadikan sumber dari penerapan akuntabilitas publik (Mardiasmo 2016,151).

2.3.3 Langkah-langkah pengukuran *Value for money*

a. Pengukuran Ekonomis Rasio ekonomis adalah perbandingan pengeluaran organisasi dengan rencana anggaran yang ditentukan. Menurut Mardiasmo (2016 : 167) pengukuran ekonomi lebih memperhatikan nilai pemasukan yang dipakai. Pengukuran yang relatif dapat dikatakan ekonomis. Pertanyaan yang menunjukkan pengukuran ekonomi menurut Mardiasmo (2016 : 167) sebagai berikut:

1. Apakah belanja instansi lebih tinggi dari yang telah dianggarkan?
2. Apakah belanja instansi lebih tinggi daripada biaya instansi lain (sama) dan bisa dibandingkan?

3. Apakah instansi telah mempergunakan sumber daya keuangannya secara maksimal?

Adapun rumus pengukuran ekonomis menurut Mardiasmo (2016 : 167) adalah sebagai berikut:

$$\text{Ekonomis} = \frac{\text{Input} \times 100\%}{\text{Input Value}}$$

b. Pengukuran Efisiensi

Menurut Mardiasmo (2016 : 167) efisiensi diukur menggunakan rasio masukan (input) dan pengeluaran (output). Yang dimaksud dengan pengukuran efisiensi yaitu semakin tinggi output dibanding input, maka semakin tinggi pula tingkat efisiensi organisasi. Adapun rumus pengukuran efisiensi menurut Mardiasmo (2016 : 167) adalah sebagai berikut:

$$\text{Efisien} = \frac{\text{Output}}{\text{input}} \times 100\%$$

c. Pengukuran Efektivitas Suatu organisasi disektor publik dapat disebut sudah efektifitas jika organisasi mampu mencapai tujuan yang ditentukan sebelumnya (Mardiasm 2016 : 168). Efektivitas merupakan pengukuran untuk menilai keberhasilan suatu organisasi dalam pencapaian tujuannya. Apabila semakin besar nilai rasio efektivitas, maka dapat dikatakan kegiatan tersebut lebih efektif.

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Outcome}}{\text{Output}} \times 100\%$$

2.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian terkait faktor-faktor yang diduga berpengaruh terhadap Pengelolaan Keuangan Sektor Publik seperti Akuntabilitas dan Konsep *Value for money* sudah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu, yakni sebagai berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Redi Antonius Nababan, Marlon Sihombing, & Husni Thamrin. (2018)	Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Keuangan Berkonsep <i>Value for money</i> pada Pemerintah di Kabupaten Dairi	Variabel Independen: Akuntabilitas (X1) Transparansi (X2) Variabel Dependen: Pengelolaan Keuangan Berkonsep <i>Value for Money</i>	Hasil penelitian menunjukkan Akuntabilitas dan Transparansi secara signifikan berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan berkonsep <i>Value for Money</i>
2	Ricky Ary Syahputa (2018)	Pengaruh Akuntabilitas Keuangan Daerah, <i>Value for Money</i> , Kejujuran, Transparansi dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kajian pada Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Pusat)	Variabel Independen: Akuntabilitas Keuangan Daerah (X1) <i>Value for Money</i> (X2) Kejujuran (X4) Transparansi (X5) Pengawasan (X6) Variabel Dependen: Pengelolaan Keuangan Daerah	Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa <i>Value For Money</i> , Kejujuran, Transparansi dan Pengawasan berhubungan secara positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah, sedangkan Akuntabilitas Keuangan Daerah menunjukkan hubungan negatif terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah.
3	Mustari, S (2020)	Pengaruh Nilai-nilai Transparansi, Akuntabilitas dan Konsep <i>Value for money</i> Terhadap Pengelolaan Keuangan Sektor Publik Pada Bappelitbangda Sul-Sel	Variabel Independen: Nilai-nilai Transparansi (X1) Akuntabilitas (X2) Konsep <i>Value for money</i> (X3) Variabel Dependen: Pengelolaan Keuangan Sektor Publik	Hasil penelitian menunjukkan Transparansi, Akuntabilitas dan <i>Value for money</i> memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan di Sektor Publik.

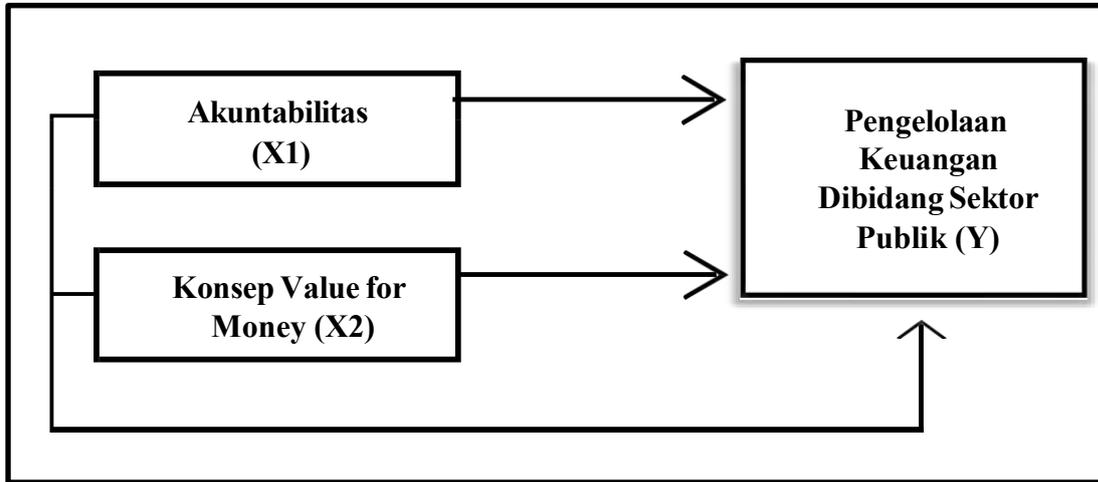
4	Mohammad Noor Afriza (2020)	Analisis Pengaruh Akuntabilitas Keuangan Daerah, <i>Value for money</i> Dan Pengawasan Terhadap Realisasi Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kota Banjarbaru Tahun 2020	Variabel Independen: Akuntabilitas Keuangan Daerah (X1) <i>Value For Money</i> (X2) Pengawasan (X3) Variabel Dependen: Realisasi Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kota Banjarbaru Tahun 2020	Hasil penelitian menunjukkan variabel Akuntabilitas Keuangan Daerah dan Pengawasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kota Banjarbaru Tahun 2020, sedangkan <i>Value for money</i> tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kota Banjarbaru Tahun 2020
5	Niken Ayu Saskia, Moh. Amin, & Junaidi (2020)	Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Perwujudan Nilai Transparansi, Pengendalian Akuntansi, Akuntabilitas, <i>Value for money</i> Terhadap Pengelolaan Akuntansi Keuangan Sektor Publik	Variabel Independen: Kejelasan Sasaran Anggaran (X1) Perwujudan Nilai Transparansi (X2) Pengendalian Akuntansi (X3) Akuntabilitas (X4) <i>Value for money</i> (X5) Variabel Dependen: Pengelolaan Akuntansi Keuangan Sektor Publik	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kejelasan Sasaran Anggaran, Perwujudan Nilai Transparansi, Pengendalian Akuntansi, Akuntabilitas dan <i>Value for money</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan

Data: Sumber diolah oleh peneliti (2023)

2.6 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan arah penelitian yang dilakukan oleh penulis yang menyatakan adanya hubungan variabel penelitian. Menurut Nahwawi (2005, 37), menjelaskan bahwa definisi dari kerangka konseptual adalah suatu hasil dari pemikiran rasional yang sangat penting untuk mengukur hasil yang akan dicapai dan juga momentum dalam merumuskan hipotesa suatu penelitian. Akuntabilitas tidak hanya kemampuan untuk menunjukkan bagaimana anggaran publik ditetapkan dan dibelanjakan, tapi juga termasuk menunjukkan kemampuan organisasi publik dalam mengelola dana publik dibelanjakan untuk secara ekonomis, efisiensi dan efektivitas. Penerapan konsep *Value for money* pada organisasi sektor publik menjadi hal yang penting untuk dilaksanakan mengingat dengan berkembangnya paksaan akuntabilitas publik serta sebagai upaya menciptakan *good governance*.

Untuk memperbaiki pengelolaan keuangan sektor publik serta meningkatkan kualitas kinerja sektor publik dengan cara memperbaiki efektivitas dan kualitas pelayanan publik, meminimalisir pengeluaran pelayanan publik, dan juga memajukan pemahaman tentang pemakaian dana publik, oleh karena itu pentingnya Akuntabilitas dan penerapan Konsep *Value for money* untuk diterapkan. Berlandaskan dari fenomena yang sudah dijelaskan dalam latar belakang, serta berdasarkan penjabaran landasan teoritis dan hasil dari beberapa penelitian terdahulu, sehingga kerangka konseptual dalam penelitian tersebut dapat dilihat pada gambar dibawah ini yang mencerminkan hubungan antara variabel- variabel independen dengan variabel dependen, sebagai berikut:



2.7 Hipotesis Penelitian

1. Pengaruh Nilai Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Dibidang Sektor Publik

Nilai Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu etika yang memiliki hubungan dengan kesanggupan dalam menguraikan tindakan dan aktivitas yang dilakukan. Akuntabilitas memiliki pengaruh terhadap pengelolaan keuangan dibidang sektor publik karena akuntabilitas berfungsi sebagai alat kontrol untuk mengukur berhasil atau tidaknya organisasi pada masa jabatan tertentu dengan meminta pertanggung jawaban atas apa yang sudah dilaksanakan, pertanggungjawaban yang dimaksud yaitu dapat berupa pelaporan pengelolaan keuangan yang dapat diandalkan. Sedangkan penerapan pengelolaan keuangan yang baik merupakan salah satu bentuk dari akuntabilitas dan sebagai bahan untuk mengukur kinerja berhasil atau tidaknya organisasi. Oleh karena itu, akuntabilitas memiliki pengaruh terhadap pengelolaan keuangan jika pelaksanaan akuntabilitas yang

diterapkan semakin baik, maka semakin baik pula pengelolaan keuangan dibidang sektor publik (Mardiasmo, 2009). Berdasarkan hasil penelitian dari Ririn Rusrina (2011) dan Niken Ayu Saskia, Moh. Amin, & Junaidi (2020) yang menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan simultan terhadap pengelolaan keuangan sektor publik. Sehingga hipotesis kedua pada penelitian ini adalah:

H1 : Nilai Akuntabilitas berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan di bidang sektor publik pada Bappeda Provinsi Sumatera Utara.

2. Pengaruh Konsep *Value formoney* Terhadap Pengelolaan

Keuangan Dibidang Sektor Publik Penilaian kinerja dibidang sektor publik dengan konsep *value for money* merupakan konsep pengukuran nilai ekonomi, efektivitas, efisiensi kinerja suatu organisasi sekotr publik. Menjadi hal yang penting sebab tujuannya untuk menghargai setiap uang yang dikeluarkan secara layak dan pergunakan dengan semestinya. *value for money* juga dijadikan sebagai ukuran atas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan terkhusus di era digital saat ini, mengingat banyak kasus *inefisiensi* anggaran dan pemborosan menjadi dasar perlu diterapkannya konsep tersebut dalam aspek pengelolaan keuangan.

Dengan mengimplementasikan prinsip ekonomi, efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan, maka pengelolaan keuangan di sektor publik akan semakin baik. Oleh karena itu untuk dapat meningkatkan kualitas pertanggungjawaban instansi kepada publik konsep *value for money* penting diterapkan sebagai upaya memanfaatkan sumber daya publik dengan sebaik-baiknya (Mardiasmo, 2009). Berdasarkan hasil penelitian Ricky Ary Syahputra

(2018) yang menjelaskan konsep *value for money* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis ketiga dan keempat penelitian ini adalah:

H2 : Konsep *Value for money* berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan di bidang sektor publik pada Bappeda Provinsi Sumatera Utara.

3. Pengaruh Nilai Akuntabilitas dan Konsep *Value for money* Terhadap Pengelolaan Keuangan Dibidang Sektor Publik

Dari penelitian terdahulu Mustari, S (2020) melakukan penelitian dimana Akuntabilitas dan Konsep *Value for money* secara bersamaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan sektor publik, hal ini juga di dukung oleh penelitian Rendy Antonius Nababan, Marlon Sihombing, dan Husni Thamrin (2018) bahwa Akuntabilitas dan Konsep *Value for money* berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan terhadap sektor publik. Dari penjelasan diatas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3 : Pengaruh Nilai Akuntabilitas dan Konsep *Value for money* berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Pengelolaan keuangan di bidang sektor publik dan Bappeda Provinsi Sumatera Utara.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu pendekatan Asosiatif. Asosiatif adalah bentuk pernyataan yang menjelaskan korelasi 2 variabel atau lebih baik secara eksplisit maupun tersirat (Martono, 2016:72).

3.2 Objek dan Waktu Penelitian

3.2.1 Objek Penelitian

Pada penelitian terdapat hal yang dijadikan sebagai sasaran atau patokan yang disebut dengan variabel. Oleh karena itu, variabel disebut sebagai fenomena yang menjadi pusat perhatian dalam penelitian untuk diteliti dan diukur. Operasional variabel merupakan variabel yang lengkap yang harus diamati dan dapat diukur guna mendapatkan data penelitian (Sugiyono : 2016). Dalam penelitian ini menggunakan 2 (dua) jenis variabel yang terdiri dari variabel independen dan variabel dependen.

a. Variabel Independen Menurut Sugiyono (2016) mendefinisikan variabel independen selaku variabel penyebab adanya perubahan pada variabel dependen. Variabel independen pada penelitian ini yaitu akuntabilitas dan konsep value for money.

b. Variabel Dependen Menurut Sugiyono (2016), variabel dependen adalah variabel yang terpengaruhi dan disebut sebagai variabel yang jadi akibat dari adanya variabel independen. Variabel dependen pada penelitian ini yaitu pengelolaan keuangan disektor publik.

3.2.2 Waktu Penelitian.

Waktu penelitian ini direncanakan dimulai dari penyusunan usulan penelitian sampai terlaksana laporan penelitian ini, yaitu bulan September 2022 sampai dengan selesai. Secara lebih terperinci untuk rencana waktu penelitian dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.1
Waktu Penelitian

No	Keterangan	2022		2023					
		Nov	Des	Jan & feb	Mar & Apr	Mei & Juni	Juli & agustus	September	April
1	Pengajuan Judul Skripsi								
2	Penyelesaian Proposal								
3	Bimbingan Proposal								
4	Seminar Proposal								
5	Pengumpulan Data								
6	Penyusunan dan Bimbingan Skripsi								
7	Seminar Hasil								
8	SidangMeja Hijau								

3.3 Defenisi Operasional Variabel Dan Instrumen Penelitian

3.3.1 Definisi Operasional Variabel

Pada penelitian terdapat hal yang dijadikan sebagai sasaran atau patokan yang disebut dengan variabel. Oleh karena itu, variabel disebut sebagai fenomena yang menjadi pusat perhatian dalam penelitian untuk diteliti dan diukur. Operasional variabel merupakan variabel yang lengkap yang harus diamati dan dapat diukur guna mendapatkan data penelitian (Sugiyono : 2016). Dalam penelitian ini menggunakan 2 (dua) jenis variabel yang terdiri dari variabel independen dan variabel dependen.

- a. Variabel Independen Menurut Sugiyono (2016) mendefinisikan variabel independen selaku variabel penyebab adanya perubahan pada variabel dependen. Variabel independen pada penelitian ini yaitu nilai transparansi, akuntabilitas dan konsep *value for money*.
- b. Variabel Dependen Menurut Sugiyono (2016), variabel dependen adalah variabel yang terpengaruhi dan disebut sebagai variabel yang jadi akibat dari adanya variabel independen. Variabel dependen pada penelitian ini yaitu pengelolaan keuangan disektor publik.

Tabel 3.2
Defenisi Operasioanal Variabel

Variabel Penelitian	Definisi Operasional	Indikator	Skala Ukur
Nilai Akuntabilitas (X1)	<p>Nilai Akuntabilitas adalah kewajiban pihak yang ditunjuk sebagai pemegang amanah (<i>agent</i>) untuk dapat menyajikan, memberi pertanggungjawaban, melaporkan, serta mengungkapkan semua aktivitas sebagai bentuk tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (<i>prinsipal</i>) yang mempunyai kewenangan untuk mendapatkan pertanggungjawaban tersebut.</p> <p>(Mardiasmo 2016 : 20)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kejujuran (<i>abuse of power</i>). 2. Prosedur sistem informasi akuntansi yang baik. 3. Pertimbangan tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak. Kebijakan pertanggungjawaban pemerintah. <p>(Mardiasmo 2016 : 20)</p>	Ordinal
Konsep <i>Value for money</i> (X2)	<p><i>Value for money</i> merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang didasarkan pada tiga elemen utama yaitu ekonomis, efisien dan efektivitas.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ekonomi 2. Efisiensi 3. Efektivitas <p>(Mardiasmo 2016 : 164)</p>	Ordinal

Pengelolaan Keuangan Dibidang Sektor Publik(Y)	Pengelolaan keuangan sektor publik adalah semua hak dan kewajiban pusat dan daerah terkait penyelenggaraan pemerintahan dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dapat dinilai dengan uang yang dikelola secara efektif dan efisien untuk meningkatkan kinerja suatu pemerintah daerah.	1. Penyediaan informasi 2. Pengendalian manajemen 3. Akuntabilitas Mardiasmo (2016 : 18)	Ordinal
--	--	--	---------

Sumber : Data diolah Oleh peneliti (2023)

3.3.2 Instrumen Penelitian

1. Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan data kualitatif.

2. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini merupakan data primer dan data sekunder. Menurut Sugiyono (2016 : 225) data primer merupakan sumber data yang didapatkan langsung dari narasumber berupa wawancara, pendapat individu atau sekelompok individu maupun dari hasil pengamatan suatu objek atau peristiwa. Data sekunder menurut Sugiyono (2016 : 225) data yang diperoleh secara tidak langsung, misalnya melalui orang lain atau lewat dokumen dan disebut sebagai pendukung dari data primer yang berasal dari bahan-bahan literatur contohnya dokumen, laporan dan kepustakaan lainnya yang berhubungan dengan penelitian. Data primer penelitian ini adalah kuesioner yang diisi oleh pegawai negeri sipil pada kantor Bappeda Provinsi Sumatera Utara dengan skala pengukuran menggunakan skala likert.

Tabel 3.3
Jumlah Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara

No	Bidang	Jumlah Pegawai
1	Kepala Badan	1
2	Sekretaris Badan	1
3	Bidang Perencanaan Sumber Daya Manusia dan Sosial Budaya	23
4	Bidang Perencanaan Ekonomi, Kemaritiman dan Sumber Daya Alam	20
5	Bidang Perencanaan Sarana, Prasarana dan Kewilayahan	23
6	Bidang Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan	20
7	Kelompok Jabatan Fungsional	17
Jumlah		105

3.4 Populasi dan Sampel

3.4.1 Populasi

Penelitian ini dilaksanakan pada kantor Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara dengan jumlah populasi pada Bappeda Provinsi Sumatera Utara sebanyak 105 orang yang merupakan Aparatur Sipil Negara dengan rincian sebagai berikut.

3.4.2 Sampel

Menurut Sugiyono (2008 : 118) sampel merupakan komponen dari keseluruhan karakteristik pada sebuah populasi. Sedangkan metode pengambilan sampel yang digunakan yaitu purposive sampling. Menurut Sugiyono (2006) purposive sampling merupakan teknik penetapan sampel menggunakan kriteria atau pertimbangan tertentu. Berdasarkan pertimbangan, maka diperoleh 41 sampel dari jumlah populasi yang merupakan pegawai yang memiliki pangkat pada golongan III dan IV pada Bappeda Sumatera Utara, karena golongan tersebut merupakan golongan tertinggi pada kelompok Aparatur Sipil Negara yang sudah pasti memahami mengenai bagaimana prosedur pengelolaan organisasi dilaksanakan dengan baik.

Adapun bidang dan seksi atau sub bagian yang dijadikan pengambilan sampel sebagai berikut:

Tabel 3.4
Kriteria Pengambilan Sampel

No	Bidang	Jumlah Pegawai Gol III dan IV
1.	Bidang Perencanaan SDM dan Sosial Budaya	10
2.	Bidang Perencanaan Ekonomi, Kemaritiman dan SDA	10
3.	Bidang Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan	10
4.	SeksiBagian Keuangan	5
5.	SeksiBagian Monitoring dan Informasi	3
6.	Seksi Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik	3
Jumlah		41

Sumber data diolah oleh Peneliti (2023)

3.5 Metode Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan kuesioner atau angket dan wawancara. Kuesioner atau angket merupakan daftar pertanyaan secara tertulis yang diserahkan kepada subjek penelitian untuk proses pengumpulan informasi yang dibutuhkan seorang peneliti (Kusumah : 2011). Karena dengan menggunakan kuesioner dapat memudahkan responden dalam memberikan jawaban, sebab alternatif jawaban sudah disiapkan.

3.6 Metode Analisis Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh melalui dokumentasi. Menurut Sugiyono (2016:225), studi dokumentasi yaitu mengumpulkan data atau teori pendukung melalui jurnal maupun buku pendukung untuk dapat menggambarkan masalah yang diteliti serta mengumpulkan data

sekunder dari laporan keuangan perusahaan yang sudah diterbitkan oleh perusahaan dan dimuat dalam situs resmi perusahaan.

3.6.1 Analisis Statistika Deskriptif

Statistika deskriptif ini akan memberikan gambaran data yang dilihat dari nilai rata-rata, standar deviasi, nilai tengah, nilai maksimum, nilai minimum dan nilai yang sering muncul. Statistika deskriptif ini sangat penting karena dapat menyajikan ukuran numerik dan menjelaskan seluruh variabel yang terdapat dalam penelitian ini sehingga lebih mudah di mengerti (Sugiyono, 2017:35).

3.6.2 Uji Kualitas Data

Pengujian ini bertujuan untuk memperlihatkan berapa besar tingkat akurasi serta konsistensi suatu data yang sudah didapat dari proses penelitian. Uji kualitas data pada penelitian ini sebagai berikut:

a. Uji Validitas

Pengujian validitas data bertujuan untuk mengetahui data yang diperoleh setelah proses penelitian adalah data yang reliabel atau valid berdasarkan alat ukur (kuesioner) yang dipakai. Validitas dapat diartikan sebagai kecermatan dari suatu item data untuk pengukuran berdasarkan apa yang perlu diukur (Priyatno 2013:110). Uji signifikasinya dapat dilaksanakan dengan cara “membandingkan nilai r hitung dengan r tabel, bila r hitungnya $>$ r tabel kemudian nilainya positif, maka variabel tersebut dinyatakan valid, namun apabila r hitung $<$ r tabel, maka variabel tersebut dinyatakan tidak valid” (Ghozali : 2011).

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas bertujuan menunjukkan konsistensi dalam mengukur gejala yang sama berdasarkan alat ukur yang digunakan (kuesioner) dapat. Pernyataan atau

pertanyaan yang sudah diyakini valid pada uji validitasnya, kemudian akan dipastikan reliabilitasnya yaitu dengan menunjukkan nilai Cronbach's Alpha. Disebutkan bahwa "suatu variabel dikatakan reliabel apabila memberikan nilai (α) 0,60" (Ghozali : 2011).

3.6.3 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik berfungsi untuk mengetahui apakah hasil analisis regresi linier berganda yang digunakan untuk menganalisis dalam penelitian ini terbebas dari penyimpangan asumsi klasik atau tidak (Ghozali:2018). Berikut tahapan-tahapan dalam pengujian asumsi klasik adalah:

1. Uji Normalitas

Uji normalitas ini bertujuan menguji apakah model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak normal. Uji ini dapat dilakukan dengan dua cara yaitu analisis grafik dan uji statistik. Dalam penelitian ini menggunakan uji statistika dengan pengujian *Kolmogorov – Smirnov* (K-S). (Ghozali, 2018)

Pada penelitian ini untuk mengujian normalitas menggunakan pengujian Kolmogorov Smirnov, yaitu metode pengujian normalitas yang efektif dan valid digunakan untuk sampel berjumlah kecil. Dalam penelitian ini subjek penelitian berjumlah 10 orang. Sehingga pengujian normalitas menggunakan Kolmogorov Smirnov sangat cocok untuk penelitian ini. Untuk mempermudah pengujian, peneliti menggunakan bantuan aplikasi SPSS untuk melakukan analisis normalitas instrumen ini. Dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas adalah :

- a. Jika sig. (signifikansi) $< 0,05$, maka data berdistribusi tidak normal.
- b. Jika sig. (signifikansi) $> 0,05$, maka data berdistribusi normal.

2. Uji Multikolinearitas

Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya saling keterkaitan antar variabel independen. Jika ditemukan, dapat disimpulkan bahwa antar variabel independen tersebut memiliki saling keterkaitan. Maka pengujian tersebut tidak dapat dilakukan ke tahap selanjutnya karena tidak adanya koefisien regresi variabel tersebut dan juga nilai standar errornya menjadi tak terhingga. Dengan menggunakan VIF (*Variasi Inflation Factor*) dan toleransi variabel (*tolerance of variabel*). Nilai VIF yang tinggi sama dengan nilai toleransi yang rendah (karena $VIF = 1/tolerance$). Nilai *Cut Off* biasanya digunakan apabila nilai VIF kurang dari 10.

Menurut Gozhali (2018) dengan terjadinya multikolinearitas menunjukkan adanya hubungan antar variabel independen sehingga pengujian tidak dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya, dan jika tidak terdapat hubungan antar variabel maka pengujian tersebut dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya.

3. Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas ini digunakan untuk mengetahui ketidaksamaan varian selisih satu pengamatan ke pengamatan lainnya pada model regresi (Ghozali, 2018). Model regresi yang baik adalah tidak adanya terjadinya heteroskedastisitas. Pengujian ini dapat di deteksi dengan melihat ada tidaknya pola pada grafik *scatterplot* antara nilai prediksi variabel terikat yaitu ZPRED dengan residualnya SPRESID dimana sumbu Y adalah Y yang telah dipredksi dan sumbu X adalah residual yang telah di studentized. Analisis uji heteroskedastisitas menurut Ghozali (2018).

Jika terdapat pola titik-titik membentuk pola yang teratur (gelombang,

melebar dan menyempit), maka membuktikan telah terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak pola titik-titik meyebar di atas dan bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedistitas. Pengujian heteroskedastitas dalam penelitian ini mamakai Uji Glejser dengan melihat nilai signifikan (Sig) menggunakan SPSS. Apabila Sig < 0,05 maka terjadi heteroskedastitas tetapi nilai Sig > 0,05 maka tidak terjadinya heteroskedastisitas (Ghozali, 2018).

3.6.4 Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis Regresi Linear Berganda Untuk mengetahui Pengaruh Nilai Akuntabilitas dan *Value for money* terhadap Pengelolaan Keuangan, maka peneliti menggunakan teknik analisis regresi berganda dengan rumus persamaan:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Keterangan :

Y = Pengelolaan Keuangan

α = Konstanta, besar nilai Y jika X = 0

β_1 - β_2 = Koefisien regresi yaitu menyatakan perubahan nilai Y apabila terjadi perubahan nilai X.

X_1 = Nilai Akuntabilitas

X_2 = *Value For Money*

e = Error term, yaitu tingkat kesalahan penduga dalam penelitian

3.6.5 Uji Hipotesis

Pengujian secara parsial (Uji t)

Uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji-t. Uji-t bertujuan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menjelaskan variasi variabel dependen (Ghozali, 2016: 327). Adapun

kriteria pengambilan keputusan pada uji signifikansi parsial (uji-t) adalah sebagai berikut:

- a. Bila nilai $\text{sig.} < 0.05$ berarti terdapat pengaruh yang signifikan variabel independen terhadap variabel dependen.
- b. Bila nilai $\text{sig.} > 0.05$ berarti tidak terdapat pengaruh yang signifikan variabel independen terhadap variabel dependen.

Pengujian secara simultan (Uji F)

Uji statistik-F digunakan untuk menunjukkan apakah variabel-variabel independen yang telah dimasukkan ke dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Ghozali, 2016: 322). Selain itu Ghozali (2016: 323) juga menyatakan bahwa uji F juga digunakan untuk *goodness of fit* (uji kelayakan model) dilakukan untuk mengukur ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual secara statistik. Adapun kriteria pengambilan keputusan pada uji signifikansi simultan (uji-F) adalah sebagai berikut:

1. Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ dan $\text{Sig.} > 0.05$, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen.
2. Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ dan $\text{Sig.} < 0.05$, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen.

Koefisien Determinasi (R^2)

Menurut Ghozali (2016: 324) menjelaskan bahwa koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Semakin besar nilai *Adjusted R Square*

atau semakin mendekati nilai 1 maka variabel independen semakin dapat menjelaskan variabel dependennya atau semakin besar pengaruhnya terhadap variabel dependen.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dengan diketahuinya Nilai Akuntabilitas berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan Di Bidang Sektor Publik pada BAPPEDA Provinces Sumatera Utara. Maka diharapkan BAPPEDA Provinsi Sumatera Utara mempertahankan Nilai Akuntabilitas Tersebut melalui latihan untuk meningkatkan kemampuan SDM serta membangun komitmen bersama.
2. Dengan diketahuinya *Value for money* berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan Di Bidang Sektor Publik. Maka diharapkan BAPPEDA Provinsi Sumatera Utara lebih meningkatkan nilai konsep *Value for money* dengan cara memperhatikan aspek ekonomi, efisien dan efektif.
3. Akuntabilitas, dan Konsep *Value for money* berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan Di Bidang Sektor Publik.

5.2 Saran

Saran yang dapat peneliti sampaikan dari hasil penelitian ini yaitu :

1. Bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara

Peneliti mengharapkan untuk kedepannya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara bisa meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah nya dengan cara memaksimalkan penerapan nilai transparansi. Karena transparansi dibentuk untuk memberikan informasi yang bersifat informatif, komprehensif, relevan dan andal bagi masyarakat atau pihak yang membutuhkan informasi tersebut. Penerapan akuntabilitas juga harus dimaksimalkan untuk meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah mengingat akuntabilitas merupakan suatu bentuk pemberian pertanggungjawaban pengelolaan keuangan sektor publik kepada masyarakat.

Pada setiap pelaksanaan program, konsep *value for money* menjadi penting karna dengan memperhatikan segala aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas sumber daya dapat dikelola dan dimanfaatkan sebaik-baiknya sebagai bentuk pertanggungjawaban.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Agar hasil penelitian lebih relevan, peneliti selanjutnya diharapkan untuk mencoba atau menambah variabel lain terkait dengan pengelolaan keuangan dibidang sektor publik terutama pada era sistem informasi pemerintah yang berbasis elektronik saat ini. Peneliti selanjutnya dapat mengganti metode penelitian menggunakan metode kualitatif yang dilakukan dengan mewawancarai responden secara langsung agar responden lebih mengerti mengenai pernyataan yang ada dalam kuesioner sehingga

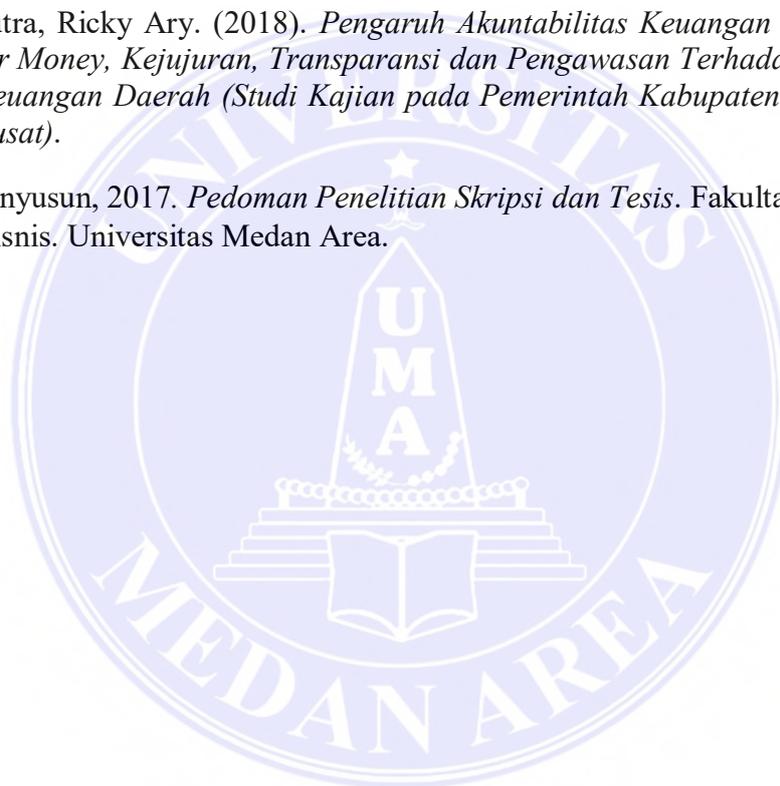
hasil penelitian akan lebih tepat dan akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. (2012). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah (Edisi 4)*. Salemba empat.
- Adhi, D. K., & Suhardjo, Y. (2013). *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah terhadap kualitas laporan keuangan (studi kasus pada pemerintah kota Tual)*. *Jurnal STIE Semarang*, 5(3), 93-111.
- Andrianto, N. (2007). *Good e-Government: Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui e-Government*. Bayumedia Publishing.
- Arikunto, S. (2006). *Prosedur Penelitian: Sebuah Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bintoro Tjokroamidjojo. (1984). *Pengantar Administrasi pembangunan*. LP3ES.
- BPKP, L. A. N. dan. (2000). *Akuntabilitas dan Good Governance, modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)*.
- Bratakusumah, Dedy Supriadi, Solihin, Dadang. (2004). *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta, Gramedia.
- Duwi Priyatno. (2013). *Mandiri Belajar Analisis Statistik Data Dengan SPSS*, Yogyakarta, Mediakom.
- Elwood, S. (n.d.). *Parish and Town Councils: Financial Accountability and Management*. *Local Government Studies*, 19, 368–386.
- Firmansyah, I. encep, & Rahmawati, P. D. (2020). *Pengaruh Kepemimpinan dan Value for money terhadap Good Government Governance Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Bandung*. *Competitive*, 15(1), 60–74.
- Ghozali, Imam. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*.
- Ghozali, Imam. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Edisi 9. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Hasugian, F. T., Syahputra, R. A., & Harahap, A. R. (2021). *Pengaruh Akuntabilitas Keuangan Daerah, Value For Money, Kejujuran, Transparansi, Dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kajian Pada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Pusat)*. *Jurnal Mutiara Akuntansi*, 6(2), 175–185. <https://doi.org/10.51544/jma.v6i2.1997>
- Kristianten. (2006). *Transparansi Anggaran Pemerintah*. Rineka Cipta.
- Kusumah. (2011). *Penelitian Tindakan Kelas*. Jakarta Indeks.

- Kusumastuti, P. (2014). *Membumikan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Sektor Publik*. PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- M. Iqbal Hasan. (2002). *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Penerbit Ghalia Indonesia.
- Mardiasmo. (2016). *Akuntansi Sektor Publik*. ANDI Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2004). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi.
- Mardiasmo. (2009). Pewujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, 2, 1–17.
- Mustari, S. (2020). *Pengaruh Nilai-Nilai Transparansi, Akuntabilitas dan Konsep Value for money Terhadap Pengelolaan Keuangan Sektor Publik Pada Bappelitbangda Sul-Sel*.
- Noor Afriza Mohammad. (2020). Analisis Pengaruh Akuntabilitas Keuangan Daerah, *Value for money* Dan Pengawasan Terhadap Realisasi Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kota Banjarbaru Tahun 2020, 17, 438- 445.
- Mustopadidjaja, A. R. (2003). *Manajemen Proses Kebijakan Publik*. LAN Kerjasama Duta Pertiwi Foundation.
- Nababan, R. A., Sihombing, M., & Thamrin, H. (2018). *Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi, terhadap Pengelolaan Keuangan Berkonsep Value for money pada Pemerintah di Kabupaten Dairi*. *Anthropos: Jurnal Antropologi Sosial Dan Budaya (Journal of Social and Cultural Anthropology)*, 4(1), 108. <https://doi.org/10.24114/antro.v4i1.10157>
- P, L. L. K. (2003). *Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi*. Sekertariat Good Public Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
- Sains, F. S. (2018). *Analisis pengaruh pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja keuangan pemerintah*.
- Rusrina, R. (2011). *Pengaruh Nilai-Nilai Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Keuangan Sektor Publik pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan*. *Jurnal Akuntansi SI*, 1–9.
- Saskia, N. A., Amin, M., & Junaedi. (2020). *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Perwujudan Nilai Transparansi, Pengendalian Akuntansi, Akuntabilitas, Value for money Terhadap Pengelolaan Akuntansi Keuangan Sektor Publik*. *E-Jra*, 09(11), 53–69.
- Sayuti, S., Majid, J., & Juardi, M. S. S. (2018). *Perwujudan Nilai Transparansi, Akuntabilitas dan Konsep Value for money dalam Pengelolaan Akuntansi Keuangan Sektor Publik (Studi Pada Kantor BAPPEDA Sulawesi Selatan)*. *ATESTASI : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1(1), 16–28. <https://doi.org/10.33096/atestasi.v1i1.39>

- Septariani, J. (2018). *Penerapan Konsep Value for money Pada Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Mewujudkan Good Government Governance (Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik) Pada Kabupaten Musi Banyuasin. BALANCE Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 2(1), 158.
<https://doi.org/10.32502/jab.v2i1.1169>
- Shafratunnisa, F. (2016). *Penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan kepada stakeholders di SD Islam Binakheir*.
- Singgih Santoso. (2006). *Menggunakan Statistik Non Parametrik*. PT. Elex Media Komputindo.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&B*. Bandung: IKAPI
- Syahputra, Ricky Ary. (2018). *Pengaruh Akuntabilitas Keuangan Daerah, Value for Money, Kejujuran, Transparansi dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kajian pada Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Pusat)*.
- Tim Penyusun, 2017. *Pedoman Penelitian Skripsi dan Tesis*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Medan Area.





LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner Penelitian

Medan, Mei 2023

Permohonan Pengisian Kuesioner

Kepada Yth. Bapak/Ibu

Ditempat

Dengan hormat

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Gata Mayo

NIM 188330167

Fakultas/ Jurusan : Ekonomi dan Bisnis/ Akuntansi

Sehubungan dengan penyelesaian tugas akhir skripsi di Universitas Medan Area, maka peneliti sangat mengharapkan bantuan dari Bapak/Ibu/responden untuk dapat menjawab seluruh pertanyaan dalam kuesioner penelitian ini. Adapun judul dari skripsi ini adalah **“Pengaruh Nilai Akuntabilitas dan Konsep *Value for money* Terhadap Pengelolaan Keuangan di Bidang Sektor Publik Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara (BAPPEDASU)”**

Saya sangat memahami dan menghargai kesibukan dan waktu Bapak/Ibu responden. Oleh karena itu, saya perkirakan pengisian data kuesioner ini hanya memerlukan waktu tidak lebih dari 15 menit, cukup memberikan jawaban untuk setiap pertanyaan.

Sesuai etika penelitian, data yang diperoleh dari Bapak/Ibu responden akan peneliti jaga kerahasiaannya dan akan dipergunakan hanya untuk

kepentingan penelitian saja. Peneliti menyadari waktu Bapak/Ibu adalah sangat berharga, tetapi waktu yang Bapak/Ibu responden luangkan untuk menjawab beberapa pertanyaan dalam kuesioner ini akan sangat bernilai tidak hanya untuk peneliti tetapi juga untuk para pembaca yang akan memerlukan skripsi penelitian ini. Oleh karena itu atas kerjasama dan bantuan Bapak/Ibu responden dalam mendukung penelitian ini, peneliti ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Demikianlah hal ini saya sampaikan, atas perhatian dan kesediaan Bapak/Ibu saya mengucapkan terima kasih.

IDENTITAS RESPONDEN

Nama (boleh tidak diisi)

Umur :

Jenis Kelamin : () Laki-laki
() Perempuan

Jabatan :

Golongan :

Pendidikan Terakhir:

PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER

Berilah tanda checklist (✓) pada jawaban yang anda pilih di lembar jawaban yang telah disediakan. Pilihlah jawaban yang sesuai dengan perasaan, pendapat, dan keadaan Bapak/Ibu/Saudara/i yang sebenarnya.

No	Pilihan Jawaban	Bobot Nilai
1	Sangat Tidak Setuju (STS)	1
2	Tidak Setuju (TS)	2
3	Netral (N)	3
4	Setuju (S)	4
5	Sangat Setuju (SS)	5

A. PENGELOLAAN KEUANGAN DIBIDANG SEKTOR PUBLIK (Y)

No.	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
1.	Melakukan review terhadap data-data laporan keuangan					
2.	Tercapainya tujuan sesuai dengan misi organisasi atau instansi					
3.	Pelayanan publik yang diselenggarakan harus dengan memerhatikan aspek-aspek pemerataan					
4.	Pendapatan daerah harus disetor sepenuhnya secara tepat waktu ke kas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku					
5.	Setiap pejabat pengelola keuangan daerah haruslah menyusun laporan pertanggungjawaban keuangannya secara periodik					
6.	Ketercapaian tujuan pemerintah yang dijabarkan pada program kerja, kegiatan dan kebijakan mencapai lebih dari 80%					
7.	Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan sesuai dengan SAP, dan menggunakan metode langsung dalam melaporkan arus kas dari aktiva operasi					
8.	Pelaporan Keuangan dapat diukur dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai efektivitas programnya					

A. AKUNTABILITAS (X1)

No.	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
1.	Tahapan pengelolaan keuangan anggaran melibatkan unsur-unsur masyarakat					
2.	Anggaran disajikan secara terbuka, cepat, dan tepat kepada seluruh masyarakat luas					
3.	Kepentingan publik dan golongan menjadi perhatian dan pertimbangan utama dalam pengelolaan keuangan anggaran					

4.	Indikator hasil kinerja yang akan dicapai telah ditetapkan dan telah digunakan untuk mengevaluasi anggaran					
5.	Laporan pertanggungjawaban dalam penyajian anggaran harus tepat waktu dan menyertakan informasi masa lalu					
6.	Dalam mengevaluasi suatu anggaran, hanya membandingkan target dengan realisasi/sesungguhnya					
7.	Anggaran dipertanggungjawabkan kepada otoritas yang lebih tinggi (vertical) dan juga kepada masyarakat luas (horizontal)					
8.	Pengalokasian anggaran selalu mengikuti proses dan prosedur yang berlaku					
9.	Penggunaan dana anggaran didasarkan atas hukum dan peraturan yang berlaku guna memberikan hasil pengelolaan yang baik					

B. KONSEP VALUE FOR MONEY (X2)

No.	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
1.	Program kerja dilaksanakan dengan memanfaatkan Uang Rupiah sebaik mungkin dengan konsep <i>value for money</i> yang berorientasi kepentingan publik					
2.	Setiap program kerja dilaksanakan dan dikelola secara ekonomis agar terhindar dari pemborosan anggaran					
3.	Setiap program kerja dilaksanakan dan dikelola dengan anggaran secara efisien					
4.	Setiap program kerja dilaksanakan dan dikelola secara efektif sesuai dengan target yang direncanakan					
5.	Adanya pemerataan anggaran pada setiap program yang disesuaikan dengan kebutuhan program tersebut					
6.	Alokasi belanja daerah harus berorientasi pada kepentingan publik					
7.	Pentingnya penerapan prinsip ekonomis, efisien dan efektif dalam penggunaan anggaran					

8.	Konsep <i>value for money</i> merupakan suatu metode untuk menciptakan <i>good governance</i> yang akuntabel, transparan, ekonomis, efisien dan efektif					
----	---	--	--	--	--	--



9.	Dalam melaksanakan kegiatan harus menghindari kegiatan-kegiatan atau pekerjaan yang tanpa tujuan atau kurang jelas					
----	--	--	--	--	--	--

Lampiran 2 Jawaban Responden

NO	Pengelolaan Keuangan Dibidang Sektor Publik (Y)								Total Y
	Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	Y.7	Y.8	
1	4	4	3	3	4	4	4	4	30
2	4	5	5	5	4	5	5	5	38
3	4	5	4	5	5	5	4	4	36
4	5	4	5	4	4	4	5	4	35
5	5	4	5	5	4	4	5	5	37
6	4	3	4	4	4	4	4	4	31
7	5	5	5	5	5	5	5	5	40
8	4	5	4	4	4	4	5	5	35
9	4	4	5	5	5	5	5	5	38
10	4	4	4	4	4	5	5	5	35
11	5	5	4	4	5	4	5	5	37
12	5	5	5	4	5	4	4	4	36
13	5	5	4	4	4	5	5	5	37
14	4	4	5	5	5	5	5	5	38
15	4	5	5	4	4	4	4	5	35
16	4	4	3	3	4	4	4	4	30
17	5	5	5	5	5	5	5	5	40
18	4	4	5	4	5	5	5	5	37
19	5	5	5	5	5	5	5	5	40

20	4	5	5	4	4	5	5	5	37
21	5	4	4	5	5	5	5	5	38
22	4	5	4	5	4	5	5	5	37
23	4	4	3	4	4	4	4	4	31
24	5	5	5	5	4	5	5	5	39
25	5	5	4	4	4	5	5	5	37
26	4	4	5	5	5	5	5	5	38
27	5	4	4	5	4	4	5	5	36
28	4	4	5	4	5	4	4	5	35
29	5	5	4	3	4	4	5	5	35
30	5	5	5	4	4	4	5	4	36
31	5	4	5	5	4	4	5	5	37
32	5	5	4	5	5	5	4	5	38
33	4	4	4	5	5	5	5	5	37
34	5	5	5	5	5	5	5	5	40
35	4	5	5	5	4	4	5	4	36
36	4	4	5	5	4	5	5	5	37
37	5	4	5	5	5	4	4	5	37
38	5	5	5	4	4	5	5	5	38
39	5	5	5	4	4	5	5	5	38
40	4	4	5	5	5	5	5	5	38
41	5	5	5	5	5	5	5	5	40

NO	Akuntabilitas (X1)									Total X1
	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X1.8	X1.9	
1	3	3	4	4	4	4	4	4	4	34
2	4	4	4	5	4	5	4	5	5	40
3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	34
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
5	3	4	3	3	5	3	5	5	5	36
6	3	3	4	4	3	4	4	3	4	32
7	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
8	3	3	4	4	4	4	4	4	4	34
9	4	4	4	4	5	5	5	4	4	39
10	3	3	4	4	4	4	4	4	5	35
11	2	2	4	4	4	4	4	5	5	34
12	5	4	4	4	4	4	3	4	4	36
13	3	3	4	4	4	4	4	4	4	34

14	4	5	4	4	4	5	4	4	4	38
15	3	3	3	4	4	5	5	5	5	37
16	2	3	5	3	4	5	4	4	4	34
17	5	4	4	5	5	4	4	5	5	41
18	5	4	4	4	4	3	4	5	4	37
19	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
20	5	5	4	5	4	4	4	4	4	39
21	4	4	4	4	4	4	5	5	5	39
22	4	4	4	3	5	4	5	5	5	39
23	3	2	5	5	4	4	4	4	5	36
24	3	3	4	5	5	3	5	5	5	38
25	3	2	4	5	5	3	5	5	5	37
26	4	5	4	4	5	3	5	4	4	38
27	4	5	3	4	4	3	4	5	4	36
28	4	4	4	4	4	4	3	4	3	34
29	5	5	4	4	4	4	4	4	5	39
30	3	3	3	4	4	4	4	4	4	33
31	5	3	5	4	4	4	5	5	5	40
32	2	5	5	5	5	4	4	4	4	38
33	4	4	4	4	4	4	4	5	5	38
34	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
35	3	3	3	4	4	4	4	5	5	35
36	4	4	3	4	5	5	5	5	4	39
37	3	3	4	4	4	5	5	4	4	36
38	4	4	4	4	5	4	5	4	4	38
39	5	5	5	5	4	3	4	4	4	39
40	3	4	4	4	5	4	5	4	5	38
41	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45

NO	Konsep Value for money (X2)									Total X2
	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2.7	X2.8	X2.9	
1	3	4	4	4	4	3	4	4	4	34
2	5	4	5	5	4	4	4	5	5	41
3	5	4	4	4	4	3	3	4	4	35
4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	34
5	5	4	4	4	5	4	4	4	5	39
6	4	4	4	4	3	3	3	4	4	33
7	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45

8	5	4	4	4	4	4	4	4	4	37
9	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
10	4	4	4	4	4	5	4	5	4	38
11	5	4	4	4	4	4	4	5	5	39
12	4	3	4	4	4	3	4	4	4	34
13	5	4	5	4	5	5	5	4	4	41
14	5	5	4	4	4	5	4	4	5	40
15	4	4	3	3	4	3	4	4	4	33
16	4	4	3	3	4	3	4	4	4	33
17	5	5	4	4	4	4	4	5	5	40
18	4	4	4	4	5	4	4	5	5	39
19	4	4	4	4	5	5	5	4	5	40
20	5	5	5	4	4	4	4	4	4	39
21	4	4	4	4	4	4	4	5	5	38
22	4	5	4	4	4	4	5	4	4	38
23	3	4	4	3	3	4	4	4	4	33
24	4	4	5	4	4	5	4	5	5	40
25	3	4	4	4	4	4	3	4	4	34
26	4	4	4	4	4	4	5	5	4	38
27	4	5	4	4	5	4	4	4	4	38
28	4	4	4	4	4	4	4	5	4	37
29	4	4	4	4	3	3	3	4	4	33
30	5	4	4	4	4	4	4	4	4	37
31	5	5	5	4	4	4	4	4	4	39
32	5	5	4	4	4	4	4	5	5	40
33	5	4	4	4	5	4	4	4	5	39
34	4	4	4	4	5	5	5	5	5	41
35	5	5	4	4	4	4	4	4	4	38
36	3	3	4	4	4	4	4	5	5	36
37	4	4	4	4	5	4	4	5	5	39
38	4	4	4	4	4	5	5	4	5	39
39	4	4	4	4	4	4	4	5	4	37
40	5	4	4	4	5	5	4	5	4	40
41	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45

Lampiran 3 Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Range	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Akuntabilitas (X1)	4	1	3	4	37.5	3.27
Konsep <i>Value for money</i> (X2)	4	1	3	4	38.0	3.20
Pengelolaan Keuangan Dibidang Sektor Publik (Y)	4	1	3	4	36.5	2.50
Valid N(listwise)	4					

Lampiran 4 Uji Normalitas Data

UJI VALIDITAS DATA VARIABEL Y

Correlations

		Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	Y.7	Y.8	TOTAL_Y
Y.1	Pearson Correlation		.379	.21	.09	.07	-.02	.24	.19	.449**
	Sig. (2-tailed)		.01	.18	.54	.63	.85	.12	.23	.00
	N	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Y.2	Pearson Correlation	.379*		.194	.019	-.020	.245	.221	.174	.465*
	Sig. (2-tailed)	.015		.224	.906	.902	.122	.166	.278	.00
	N	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Y.3	Pearson Correlation	.211	.191		.482*	.26	.24	.395	.359	.693**
	Sig. (2-tailed)	.183	.22		.00	.09	.12	.01	.02	.00
	N	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Y.4	Pearson Correlation	.093	.01	.482*		.442*	.463*	.328	.391	.705**
	Sig. (2-tailed)	.540	.90	.00		.00	.00	.03	.01	.00
	N	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Y.5	Pearson Correlation	.071	-.02	.26	.442*		.346	-.07	.23	.487**
	Sig. (2-tailed)	.631	.90	.09	.00		.02	.66	.14	.00
	N	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Y.6	Pearson Correlation	-.025	.24	.24	.463*	.346		.444*	.511*	.661**
	Sig. (2-tailed)	.851	.12	.12	.00	.02		.00	.00	.00
	N	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Y.7	Pearson Correlation	.24	.22	.395	.328	-.07	.444*		.522*	.618**
	Sig. (2-tailed)	.125	.16	.01	.03	.66	.00		.00	.00
	N	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Y.8	Pearson Correlation	.190	.17	.359	.391	.23	.511*	.522*		.675**
	Sig. (2-tailed)	.231	.27	.02	.01	.14	.00	.00		.00
	N	4	4	4	4	4	4	4	4	4
TOTAL_Y	Pearson Correlation	.449*	.465*	.693*	.705*	.487*	.661*	.618*	.675*	
	Sig. (2-tailed)	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
- Y	N	4	4	4	4	4	4	4	4	4

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

UJI VALIDITAS DATA VARIABEL X1

Correlations

		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X1.8	X1.9	TOTAL_X1
X1.1	Pearson Correlation		.659*	.25	.334	.17	.07	.07	.26	.07	.692**
	Sig. (2-tailed)		.00	.11	.03	.28	.62	.63	.10	.62	.000
	N	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
X1.2	Pearson Correlation	.659*		.20	.22	.342	.11	.08	.07	-.11	.637**
	Sig. (2-tailed)	.00		.20	.15	.02	.48	.57	.64	.48	.000
	N	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
X1.3	Pearson Correlation	.25	.20		.457*	.15	.23	.06	-.09	.12	.481**
	Sig. (2-tailed)	.11	.20		.00	.33	.14	.69	.54	.45	.001
	N	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
X1.4	Pearson Correlation	.334	.22	.457*		.24	.07	.05	.16	.22	.547**
	Sig. (2-tailed)	.03	.15	.00		.12	.64	.74	.30	.15	.000
	N	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
X1.5	Pearson Correlation	.17	.342	.15	.24		.04	.640*	.417*	.30	.621**
	Sig. (2-tailed)	.28	.02	.33	.12		.77	.00	.00	.05	.000
	N	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
X1.6	Pearson Correlation	.07	.11	.23	.07	.04		.16	.01	.07	.365*
	Sig. (2-tailed)	.62	.48	.14	.64	.77		.30	.91	.62	.019
	N	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
X1.7	Pearson Correlation	.07	.08	.06	.05	.640*	.16		.424*	.471*	.532**
	Sig. (2-tailed)	.63	.57	.69	.74	.00	.30		.00	.00	.000
	N	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
X1.8	Pearson Correlation	.26	.07	-.09	.16	.417*	.01	.424*		.631*	.525**
	Sig. (2-tailed)	.10	.64	.54	.30	.00	.91	.00		.00	.000
	N	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
X1.9	Pearson Correlation	.07	-.11	.12	.22	.30	.07	.471*	.631*		.474**
	Sig. (2-tailed)	.62	.48	.45	.15	.05	.62	.00	.00		.002
	N	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
TOTAL_X1	Pearson Correlation	.692*	.637*	.481*	.547*	.621*	.365	.532*	.525*	.474*	
	Sig. (2-tailed)	.00	.00	.00	.00	.00	.01	.00	.00	.00	
	N	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

UJI VALIDITAS DATA VARIABEL X2

Correlations

		X2.	TOTAL_X2								
X2.1	Pearson Correlation		.497	.396	.425	.329	.26	.15	.06	.21	.594
	Sig. (2-tailed)		.00	.01	.00	.03	.09	.32	.68	.17	.00
	N	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
X2.2	Pearson Correlation	.497		.442	.30	.17	.28	.24	.04	.13	.545
	Sig. (2-tailed)	.00		.00	.05	.27	.07	.12	.78	.40	.00
	N	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
X2.3	Pearson Correlation	.396	.442		.690	.25	.481	.29	.27	.27	.688
	Sig. (2-tailed)	.01	.00		.00	.11	.00	.05	.08	.08	.00
	N	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
X2.4	Pearson Correlation	.425	.30	.690		.397	.442	.310	.424	.424	.727
	Sig. (2-tailed)	.00	.05	.00		.01	.00	.04	.00	.00	.00
	N	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
X2.5	Pearson Correlation	.329	.17	.25	.397		.536	.543	.26	.440	.683
	Sig. (2-tailed)	.03	.27	.11	.01		.00	.00	.09	.00	.00
	N	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
X2.6	Pearson Correlation	.26	.28	.481	.442	.536		.644	.393	.468	.787
	Sig. (2-tailed)	.09	.07	.00	.00	.00		.00	.01	.00	.00
	N	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
X2.7	Pearson Correlation	.15	.24	.29	.310	.543	.644		.25	.340	.658
	Sig. (2-tailed)	.32	.12	.05	.04	.00	.00		.11	.03	.00
	N	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
X2.8	Pearson Correlation	.06	.04	.27	.424	.26	.393	.25		.505	.527
	Sig. (2-tailed)	.68	.78	.08	.00	.09	.01	.11		.00	.00
	N	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
X2.9	Pearson Correlation	.21	.13	.27	.424	.440	.468	.340	.505		.636
	Sig. (2-tailed)	.17	.40	.08	.00	.00	.00	.03	.00		.00
	N	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
TOTAL_X2	Pearson Correlation	.594	.545	.688	.727	.683	.787	.658	.527	.636	
	Sig. (2-tailed)	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
	N	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

UJI RELIABILITAS DATA Y

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.73	

UJI RELIABILITAS DATA X1

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.69	

UJI RELIABILITAS DATA X2

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.82	

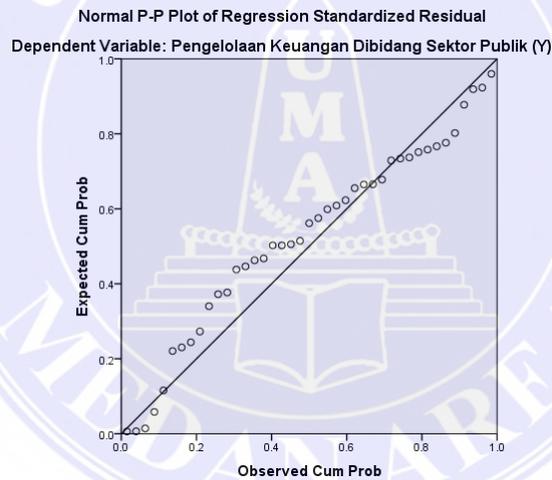
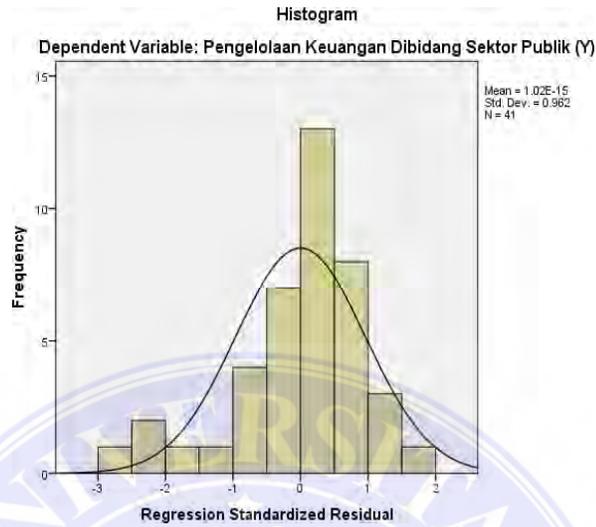
Lampiran 5 Uji Asumsi Klasik

UJI NORMALITAS One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		4
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.000000
	Std. Deviation	1.2770159
Most Extreme Differences	Absolute	.14
	Positive	.09
	Negative	-.14
Kolmogorov-Smirnov Z		.91
Asymp. Sig. (2-tailed)		.37

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.



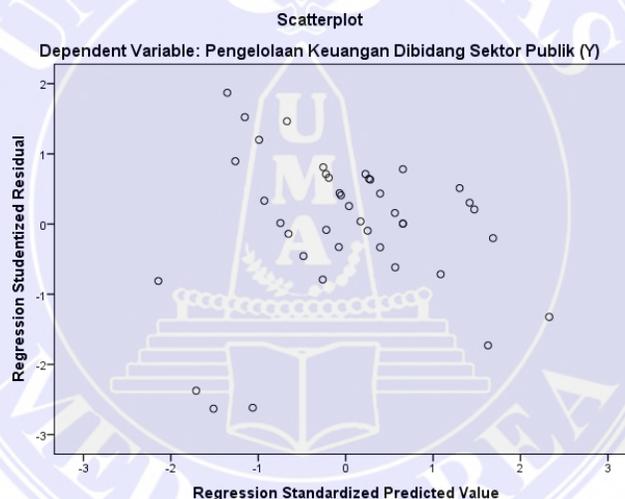
UJI MULTIKOLINEARITAS (VIF DAN TOLERANCE)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficient	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	Akuntabilitas (X1)	.28	.08	.37	3.51	.00	.62	1.589
	Konsep <i>Value for money</i> (X2)	.36	.08	.44	4.32	.00	.61	1.633

a. Dependent Variable: Pengelolaan Keuangan Dibidang Sektor Publik (Y)

UJI HETEROKEDASTISITAS



Lampiran 6 Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	Akuntabilitas (X1)	.28	.08	.37	3.51	.00
	Konsep <i>Value for money</i> (X2)	.36	.08	.44	4.32	.00

a. Dependent Variable: Pengelolaan Keuangan Dibidang Sektor Publik (Y)

Lampiran 7 Uji Hipotesis

UJI T PARSIAL Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	Akuntabilitas (X1)	.28	.08	.37	3.51	.00
	Konsep <i>Value for money</i> (X2)	.36	.08	.46	4.32	.00

a. Dependent Variable: Pengelolaan Keuangan Dibidang Sektor Publik (Y)

UJI F SIMULTAN ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	184.72	2	61.57	34.926	.000 ^b
	Residual	65.23	3	1.76		
	Total	249.95	4			

a. Dependent Variable: Pengelolaan Keuangan Dibidang Sektor Publik (Y)

b. Predictors:(Constant), Konsep *Value for money* (X2), Akuntabilitas (X1)

UJI KOEFISIEN DETERMINASI (R²)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.860	.73	.71	1.31

a. Predictors:(Constant), Konsep *Value for money* (X2), Akuntabilitas (X1)

b. Dependent Variable: Pengelolaan Keuangan Dibidang Sektor Publik (Y)

Lampiran 8 Surat Izin Penelitian



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7360168, 7366878, 7364348 (061) 7368012 Medan 20223
 Kampus II : Jalan Selabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A ☎ (061) 8225602 (061) 8226331 Medan 20122
 Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ.medanarea@uma.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 1227/FEB.1/06.5/V/2024

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Medan Area dengan ini menerangkan :

Nama : GATA MAYO JULIO SIMBOLON
 NPM : 188330167
 Program Studi : Akuntansi

Bahwa mahasiswa tersebut diatas telah melaksanakan pengambilan data / riset untuk penulisan skripsi dari jalur Internet yang berjudul :

“PENGARUH NILAI AKUNTABILITAS DAN KONSEP VALUE FOR MONEY TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DI BIDANG SEKTOR PUBLIK PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA (BAPPEDASU)”

Selama melakukan pengambilan data / riset mahasiswa mengikuti arahan sesuai peraturan dan tetap berperilaku baik. Surat keterangan ini dikeluarkan untuk mahasiswa memperoleh data. Demikian surat keterangan ini diperbuat untuk dipergunakan seperlunya.

A.n Dekan, 22 Mei 2024
 Ketua Program Studi Akuntansi


Rofiq Swaminah Ananda, SE, M.Si



Lampiran 9 Surat Selesai Penelitian



PEMERINTAH PROVINSI SUMATRA UTARA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
 Jalan P. Diponegoro No.21 A Telp. (051) 4538045, (061) 4571306, FAX. (061) 4513830
 E-mail: beppeda@sumutprov.go.id, Homepage: http://www.bappeda.sumutprov.go.id
 Medan Kode Pos 20152

Nomor Sifat Lampiran Perihal	071/799/Skr/Bappeda/IV/2023 - Surat Selesai Penelitian	Medan, 12 Juli 2023 Kepada Yth, Sdr Wakil Dekan FEB Univ Medan Area di- Medan
---------------------------------------	--	---

Berdasarkan Surat Wakil Dekan Bidang Kependidikan, Penelitian dan Pengabdian Fakultas Ekonomi dan Bisnis Univ Medan Area Nomor 1640/FEB/83301 I/II/2023 tanggal 3 April 2023 perihal Izin Research / Survey dan Surat Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 071/529/Skr/Bappeda/II/2023 tanggal 10 April 2023 perihal Izin Ressearch / Survey, yang namanya tersebut dibawah ini

Nama : Gata Mayo Julio Simbolon
 Nim : 188330167
 Prog.Studi : Strata 1 Akuntansi

Mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan Riset di Kantor Bappeda Provinsi Sumatera Utara, Untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul "Pengaruh Nilai Akuntabilitas dan Konsep Value For Money Terhadap Pengelolaan Keuangan Di Bidang Sektor Publik Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Bappedasu)".

Demikian hal ini disampaikan, untuk menjadi perhatian dan dipedomani sebagaimana mestinya



SEKRETARIS BADAN PERENCANAAN
 PEMBANGUNAN DAERAH
 SUMATERA UTARA
 KEMOND, ST
 PEMBINA
 NIP. 19770628 200502 1 001

Tembusan Yth

1. Bapak Plt.Kepala Bappeda Provinsi Sumtra Utara (sebagai laporan);
2. Para Kepala Bidang dilingkungan Bappeda Provsu;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui;
4. Pertinggal